

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012 - 2016

Terwujudnya
Pelayanan
Kesehatan yang
berkualitas dan
mandiri pada
tahun 2016



**Dinas Kesehatan
Provinsi Sulawesi Barat
2014**

Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat
Jalan Kurungan Bassi No 19 Mamuju 91511
Telpon 0426 - 21027 Fax 0426 - 22579
Email : dinkessulbar@gmail.com
Website : www.dinkes.sulbarprov.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR : 430/ 3261/DKP-SB/TU-3/VII/2013**

**TENTANG
RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN
PROVINSI SULAWESI BARAT
TAHUN 2012–2016**

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menjamin upaya pencapaian tujuan pembangunan kesehatan di Provinsi Sulawesi Barat dan sebagai kelanjutan dari pelaksanaan pembangunan jangka menengah tahun 2006-2011, maka perlu disusun rencana strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat;
- b. bahwa rencana strategis sebagaimana dimaksud pada huruf a telah disusun sebagai satu dokumen perencanaan indikatif yang memuat program-program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan;
- c. bahwa dengan adanya perkembangan situasi internal dan eksternal maka Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap visi, misi, dan nilai-nilai yang diakomodir dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2012-2016 ;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah
5. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
6. Undang-undang Nomor: 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
8. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Provinsi dan Kabupaten/Kota
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009;

12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131/Menkes/II/SK/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 4/Menkes/I/SK/2003 tentang Kebijakan Strategis Desentralisasi Kesehatan
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 81/Menkes/I/SK/2004 Perencanaan Kesehatan Provinsi, Kabupaten/kota dan Rumah Sakit;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 021/Menkes/SK/I/2011 Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014
18. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 23 Tahun 2009 tentang tugas pokok dan fungsi organisasi dan tata kerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat;
19. Peraturan Daerah NomoR 1 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2012-2016
19. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target Tujuan Pembangunan Millennium Development Goals (MDGs) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 – 2015

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat tentang Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012-2016.

Kedua Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012-2016 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

Ketiga Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua digunakan sebagai acuan bagi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat dalam penyelenggaraan program pembangunan kesehatan.

Keempat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mamuju
Pada tanggal : Juli 2013

**KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI SULAWESI BARAT**



dr. H. ACHMAD AZIS, M.Kes



DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT

KATA PENGANTAR KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka sebagai salah satu pelaku pembangunan kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Tahun 2012-2016.

Renstra Dinas Kesehatan merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat berbagai program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Kesehatan untuk kurun waktu tahun 2011-2016, dengan penekanan pada pencapaian sasaran Prioritas Nasional, Standar Pelayanan Minimal (SPM), *Millenium Development Goals (MDG's)*, Program daerah dan Program Bangun Mandiri.

Tantangan pembangunan kesehatan dan permasalahan pembangunan kesehatan makin bertambah berat, kompleks, dan bahkan terkadang tidak terduga. Oleh sebab itu pembangunan kesehatan dilaksanakan dengan memperhatikan dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta globalisasi dan demokratisasi dengan

semangat kemitraan, kerja sama lintas sektoral serta mendorong peran serta aktif masyarakat.

Melalui kesempatan ini saya mengajak kepada semua unsur Dinas Kesehatan Kesehatan untuk saling bahu-membahu dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan guna mewujudkan Dinas Kesehatan **"TERWUJUDNYA PELAYANAN KESEHATAN YANG BERKUALITAS DAN MANDIRI"**

Semoga kita mendapat rahmat, hidayah dan ridha-Nya. Amin

Mamuju, Juli 2013

**KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI SULAWESI BARAT**

dr. H. **ACHMAD AZIS, M.Kes**



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	Iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. LANDASAN HUKUM	2
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	4
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN.....	6
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD.....	8
2.1. TUGAS , FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI.....	8
2.2. FUNGSI DAN TUGAS ESELON II DAN III.....	9
2.3 SUMBER DAYA SKPD.....	20
2.4. KINERJA PELAYANAN SKPD	25
2.5. CAPAIAN KINERJA PELAYANAN	31
2.6 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD	32
BAB III. ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	34
3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SKPD	34
3.2. TELAHAH VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH	37
3.3. TELAHAH RENSTRA.....	39
3.4 TELAHAH RTRW DAN KLH	40
3.5. PENENTUAN ISSUE STRATEGIS.....	41
BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN , SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH.....	43
4.1. VISI DAN MISI.....	43
4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH.....	48
BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN.....	49
BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD	72

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat	19
Gambar 2.2	Jumlah Puskesmas Sulawesi Barat 2006 – 2011	21
Gambar 2.3	Jumlah Puskesmas Perawatan dan Non Perawatan 2006 – 2011	22
Gambar 2.4	Rasio Puskesmas Per 100.000 penduduk 2006-2011	22
Gambar 2.5	Jumlah Pustu Sulawesi Barat 2009 – 2011	23
Gambar 2.6	Jumlah Puskesmas Pembantu menurut kabupaten 2011	23
Gambar 2.7	Umur Harapan Hidup Sulawesi Barat 2005 - 2010	26
Gambar 2.8	AKI Sulawesi Barat 2006 – 2011	27
Gambar 2.9	AKB Sulawesi Barat 2007 – 2011	29
Gambar 2.10	Angka Kematian Balita Sulawesi Barat 2007 - 2011	30
Gambar 2.11	Gambaran satus Gizi Sulawesi Barat 2007 dan 2010	30
Gambar 2.12	Angka Penemuan Penderita TB BTA Positif tahun 2011	22
Gambar 3.13	Sistem Perencanaan pembangunan	40

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pegawai Dinas Kesehatan berdasarkan pendidikan	20
Tabel 2.2	Pegawai Dinas Kesehatan berdasarkan golongan	20
Tabel 2.3	Sarana dan prasarana Unit Kerja Dinas Kesehatan 2011	24
Tabel 2.4	Anggaran Dinas Kesehatan menurut Sumber tahun 2011	24
Tabel 2.5	Alokasi dan realisasi anggaran APBD tahun 2007-2012	25
Tabel 2.6	Capaian kinerja Dinas Kesehatan 2006 – 2011	31
Tabel 6.7	Indikator Kinerja Dinas Kesehatan 2011 – 2016	72

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan pada perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata, serta pengutamakan dan manfaat dengan perhatian khusus pada penduduk rentan, antara lain ibu, bayi, anak, lanjut usia (lansia), dan keluarga miskin. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1) bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Keberhasilan pembangunan daerah, dapat di lihat dari pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dimana untuk mencapai IPM tersebut, salah satu komponen utama yang mempengaruhinya yaitu indikator status kesehatan selain pendidikan dan pendapatan per kapita. Dengan demikian pembangunan kesehatan merupakan salah satu upaya utama untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang pada gilirannya mendukung percepatan pembangunan daerah.

Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik dimasa mendatang diperlukan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012 – 2016, yang berisi visi, misi serta tahapan-tahapan kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mencapai target (indikator) yang

telah ditetapkan. Tahap-tahap kegiatan pembangunan kesehatan tersebut dituangkan dalam bentuk Rencana Strategi 2012-2016.

Dinas Kesehatan Sulawesi Barat sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Provinsi Sulawesi Barat mempunyai tugas untuk membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesehatan dalam rangka mewujudkan visi Provinsi Sulawesi Barat yaitu **“Terwujudnya Percepatan pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Sulawesi Barat Pada 2016”**

Rencana strategi Dinas Kesehatan merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat berbagai program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat maupun dengan mendorong peran aktif masyarakat untuk kurun waktu tahun 2012-2016, dengan penekanan pada pencapaian Target RPJMD, Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan *Millenium Development Goals (MDG's)*.

1.2. LANDASAN HUKUM

- a. Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
- c. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- e. Undang –Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025
- f. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

- g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang keuangan daerah
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta kedudukan keuangan Gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah Provinsi
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan uang Negara / daerah
- k. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 -2014
- l. Instruksi Presiden RI Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- m. Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2010 tentang program pembangunan yang berkeadilan, terkait dengan Program Percepatan Pencapaian Target Tujuan Pembangunan Millennium Development Goals (MDGs)
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Tahap Perencanaan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- o. Peraturan Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- p. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 741/MENKES/PER/VIII/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota.

- q. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 374 /Menkes/SK/V/2009 Tentang Sistem Kesehatan Nasional
- r. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 375 /Menkes/SK/V/2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan Tahun 2005-2025
- s. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 021/Menkes/SK/I/2011 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010 – 2014
- t. Peraturan Daerah tentang perubahan atas peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat No 3 Tahun 2009 tentang organisasi dan tata kerja Dinas – Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat
- u. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012 -2016.
- v. Rancangan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang tugas pokok dan fungsi organisasi dan tata kerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat
- w. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target Tujuan Pembangunan Millennium Development Goals (MDGs) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 – 2015

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat merupakan acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Rencana Strategis SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat disusun dengan maksud sebagai berikut :

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi pembuat kebijakan dalam pembangunan kesehatan di Provinsi Sulawesi Barat dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan tahunan yang akan didanai dari berbagai sumber pendanaan baik dari APBD, APBN maupun sumber-sumber lainnya.
2. Menyediakan tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Pembangunan Kesehatan di Provinsi Sulawesi Barat.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi pembangunan kesehatan secara umum di Provinsi Sulawesi Barat saat ini sekaligus memahami arah dan tujuan yang akan dicapai dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat
4. Memudahkan Pemangku Kepentingan pembangunan kesehatan di Provinsi Sulawesi Barat dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan dan satu tahunan transisi.

Tujuan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012 – 2016 adalah sebagai berikut :

1. Merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012 – 2016 Bidang Kesehatan
2. Merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran tahunan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2012 – 2016.

3. Merupakan acuan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja Bidang Kesehatan
4. Merupakan rencana antisipatif dan inovatif dalam menghadapi berbagai perubahan laju pembangunan Kesehatan yang terjadi di Provinsi Sulawesi Barat.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Bab I : Memaparkan mengenai latar belakang penyusunan Rencana Strategis / Renstra SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat yang memberikan detail dasar pemikiran dan dasar hukum penyusunannya. Di Bagian ini juga dijelaskan mengenai maksud dan tujuan dari penyusunan rencana Strategis.

Bab II : Menguraikan gambaran umum pelayanan SKPD

Bab III : Memberikan paparan mengenai berbagai macam isu strategis yang diperkirakan dapat mempengaruhi pencapaian tujuan Renstra. Isu dilandasi oleh kondisi masa lalu, kondisi saat ini dan perkiraan kondisi di masa yang akan datang

Bab IV : Bagian ini merupakan pokok dari Renstra yang menguraikan mengenai hasil rumusan Visi, misi, nilai, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan. Dalam bagian ini penjelasan mengenai Nilai-nilai yang dianut perlu untuk disampaikan sebagai pegangan moral bagi setiap pelaksana pembangunan kesehatan di Provinsi Sulawesi Barat

Bab V : Berisi penjelasan mengenai program yang diuraikan dengan sistematika rencana program, bentuk kegiatan, indikator kinerja dan sasaran

program. Program-program seluruhnya disampaikan dalam bab ini dimulai dari pemberantasan penyakit sampai dengan sistem informasi kesehatan.

Bab VI : Indikator Kinerja SKPD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BIDANG KESEHATAN

Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat merupakan Dinas Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat dan unsur pelaksana urusan daerah dibidang kesehatan berdasarkan kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Barat melalui Sekretaris Daerah

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat dalam Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
3. Bidang Bina Kesehatan Masyarakat
4. Bidang Pelayanan Medis
5. Bidang Bina P2PL
6. Bidang Pelayanan Farmasi

Setiap Kepala Bidang membawahi 3 (tiga) Kepala Seksi sesuai bidangnya. Sedangkan Sekretaris dibantu 3 (tiga) Kepala Sub Bagian yaitu Sub Bagian Umum dan kepegawaian, Sub Bagian Keuangan dan perlengkapan dan Sub Bagian Program dan pelaporan

Dinas Kesehatan Provinsi juga mempunyai Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang bertanggungjawab langsung kepada kepala Dinas Kesehatan Sulawesi Barat dan hubungan koordinasi dengan bidang lain yang bertanggung terhadap ketersediaan obat. UPT tersebut yaitu Intalasi Farmasi

Dalam Perda tersebut Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kesehatan dan menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
2. Penyelenggaraan bidang urusan kesehatan meliputi regulasi dan kebijakan kesehatan meliputi regulasi dan kebijakan kesehatan, bina pelayanan kesehatan, bina penyehatan lingkungan dan pengendalian penyakit serta sumber daya kesehatan
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas-tugas kesehatan meliputi regulasi dan kebijakan kesehatan bina pelayanan kesehatan, bina penyehatan lingkungan dan pengendalian penyakit serta sumber daya kesehatan
4. Penyelenggaraan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD

2.2 Fungsi dan Tugas Eselon II dan III Dinas Kesehatan

1. Kepala Dinas
 - a. Menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan kesehatan di Provinsi;
 - b. Penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis dibidang kesehatan meliputi regulasi dan kebijakan kesehatan, bina pelayanan kesehatan, bina pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan serta sumber daya kesehatan;
 - c. Penyelenggaraan fasilitas dan pengendalian pelaksanaan tugastugas dibidang kesehatan;
 - d. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka tugas pokok dan fungsi dinas,
 - e. Menyelenggaraan koordinasi dan pembinaan UPTD
 - f. Menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan kesehatan di Provinsi;
 - g. Memimpin, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas;
 - h. Menyelenggarakan dan menetapkan kebijakan teknis dinas sesuai dengan kebijakan umum Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;
 - i. Menyelenggarakan fasilitas yang berkaitan dengan penyelenggaraan

program, kesekretariatan regulasi dan kebijakan kesehatan, bina pelayanan kesehatan, bina pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan serta sumber daya kesehatan;

- j. Memberikan saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Gubernur mengenai situasi kesehatan sebagai bahan penetapan kebijakan umum Provinsi Sulawesi Barat;
- k. Menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama dengan Instansi Pemerintah, Swasta dan Lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dinas;
- l. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan rencana strategis, pelaksanaan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LPPD, LKPJ dinas yang meliputi kesekretariatan, regulasi dan kebijakan kesehatan, bina pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan serta sumber daya kesehatan;
- m. Menyelenggarakan koordinasi dan membina UPTD;
- n. Menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum dibidang kesehatan;
- o. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- p. Menyelenggarakan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/kota;
- q. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- r. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

2. Sekretariat

- a. Penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program dinas;
- b. Penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan
- c. Pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum.
- d. Menyelenggarakan pengkajian dan koordianasi perencanaan program dinas;
- e. Menyelenggarakan perencanaan dan program kesekretariatan;
- f. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan;

- g. Menyelenggarakan pengkajian anggaran belanja;
 - h. Menyelenggarakan pengendalian administrasi belanja;
 - i. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - j. Menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - k. Menyelenggarakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - l. Menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
 - m. Menyelenggarakan pengkajian bahan Rencana Strategis, Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP), LPPD, LKPJ dinas;
 - n. Menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
 - o. Menyelenggarakan monitoring dan Evaluasi Sekretariat;
 - p. Menyelenggarakan pembinaan jabatan fungsional;
 - q. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - r. Menyelenggarakan telaah staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - s. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
3. Bidang Bina Gizi, Kesehatan Ibu dan Anak
- a. Menyelenggarakan penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Kestradkom dan Kesker;
 - b. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan dan fasilitasi penyusunan pedoman dan supervise di bidang Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Kestradkom dan Kesker
 - c. Menyelenggarakan penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang Bina Gizi, KIA, Kestradkom dan Kesker;
 - d. Menyelenggarakan fasilitasi penyusunan pedoman dan supervisi di Bidang Bina Gizi, KIA, Kestradkom dan Kesker;
 - e. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi gizi, kesehatan ibu, kesehatan anak, kestradkom, dan kesker;
 - f. Menyelenggarakan kerjasama bidang bina gizi dan KIA dengan bidang lainnya;

- g. Menyelenggarakan koordinasi dengan badan koordinasi pemerintahan dan pembangunan wilayah dalam pelaksanaan tugas di kabupaten/kota;
 - h. Menyelenggarakan monitoring dan Evaluasi bidang bina Gizi, KIA, Kestrادkom dan Kesker;
 - i. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. Melaksanakan penyusunan bahan telaah staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan
 - k. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait
 - l. Mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - m. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
 - n. Membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - o. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan
 - q. sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas
4. Bidang Pelayanan Medis
- a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis pengawasan Bidang Bina pelayanan Kesehatan Dasar;
 - b. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi pelayanan kesehatan dasar;
 - c. Penyelenggaraan fasilitasi pelayanan kesehatan dasar;
 - d. Menyusun rencana kegiatan bidang pelayanan kesehatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - e. Mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
 - f. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan

- kegiatan bawahan;
- g. Membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - h. Menyusun rencana tahunan dan lima tahunan upaya pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan, pengembangan dan penunjang serta sarana, prasarana dan alat kesehatan;
 - i. Melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan manajemen kesehatan dan sarana pelayanan kesehatan;
 - j. Melaksanakan pembinaan terhadap mutu pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan;
 - k. Melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan sistem informasi dan sarana pelayanan kesehatan;
 - l. Melaksanakan bimbingan teknis dan pengendalian pelayanan kesehatan;
 - m. Mengelola pelayanan kesehatan rujukan sekunder dan tersier tertentu;
 - n. Melaksanakan pemberian rekomendasi izin sarana kesehatan, registrasi, akreditasi, dan sertifikasi sarana kesehatan sesuai bidang tugasnya dan peraturan perundang-undangan;
 - o. Melaksanakan penyelenggaraan organisasi pembelajaran (learning organization) dalam bidangnya yang bersifat pendidikan dalam jabatan (on the job training);
 - p. Melaksanakan koordinasi lintas sektor dan program dalam upaya pelayanan kesehatan;
 - q. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang pelayanan kesehatan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan;
 - r. melaksanakan penyusunan telaah staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - s. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya

5. Bidang Pengendalian Penyakit dan Kesehatan lingkungan
 - a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan;
 - b. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan;
 - c. Penyelenggaraan penyiapan bahan fasilitasi pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan
 - d. Menyusun rencana kegiatan bidang Bina Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - e. Mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - f. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
 - g. Membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - h. Menyusun rencana tahunan dan lima tahunan kegiatan pengendalian penyakit menular, pengamatan penyakit tidak menular, imunisasi, kesehatan mata dan penyehatan lingkungan;
 - i. Melaksanakan surveilans epidemiologi, penyelidikan dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan wabah;
 - j. Melaksanakan pencegahan dan penanggulangan penyakit;
 - k. Melaksanakan penyelenggaraan organisasi pembelajaran (*learning organization*) dalam bidangnya, yang bersifat pendidikan dalam jabatan (*on the job training*);
 - l. Melaksanakan koordinasi lintas sektor dan program dalam upaya pelayanan kesehatan;
 - m. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;

- n. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - o. Melaksanakan penyusunan telaah staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya
6. Bidang Bina Kefarmasian dan Jaminan Kesehatan
- a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis pelayanan Bidang Bina Kefarmasian dan Jaminan Kesehatan;
 - b. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi pelayanan Bidang Bina Kefarmasian dan Jaminan Kesehatan;
 - c. Penyelenggaraan penyiapan bahan fasilitas pelayanan Bidang Bina Kefarmasian dan Jaminan Kesehatan
 - d. Melaksanakan NSPK Kefarmasian dan Jaminan Kesehatan serta promkes;
 - e. Melaksanakan pedoman pelaksanaan kebijakan dan standar operasional kefarmasian dan jaminan kesehatan serta promkes;
 - f. Melaksanakan pedoman registrasi saran dan tenaga pelayanan farmasi, alkes dan PKRT;
 - g. Menyusun rencana kegiatan kefarmasian, promkes dan jaminan kesehatan;
 - h. Menyusun perencanaan, pedoman dan pengendalian program farmasi dan makanan minuman, promkes dan jaminan kesehatan;
 - i. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan ke seksi-seksi (pelimpahan wewenang ke seksi-seksi)
 - j. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang yang terkait dengan lintas sektor (bidang lain) dan advokasi kefarmasian, promkes dan jaminan kesehatan;
 - k. Melaksanakan pemantauan, monitoring dan Evaluasi dan pelaporan program pengembangan kefarmasian, promkes dan jaminan kesehatan;
 - l. Mengoreksi dan memaraf naskah dinas;

- m. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyediaan dan pengelolaan obat, Reagensia dan vaksin melalui IFP/IFK;
 - n. Melaksanakan penyusunan telaah staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - o. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan
7. UPTD Instalasi Farmasi
- a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan;
 - b. Pelaksana Teknis Dinas Instalasi Farmasi Provinsi;
 - c. Pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan Unit
 - d. Pelaksanaan monev ketersediaan obat di sarana pelayanan kesehatan
 - e. Menyusun rencana kegiatan Instalasi Farmasi Provinsi Sulawesi Barat
 - f. Mendelegasikan tugas-tugas tertentu, dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - g. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
 - h. Mengelola obat/perbekalan kesehatan (perbekes) (APBD, APBN, Program, Poliklinik) yakni merencanakan, mengadakan, menerima, menyimpan dan mendistribuskannya keseluruh kabupaten Provinsi Sulawesi Barat, serta mencatat dan melaporkan, mengevaluasi, mengendalikan dan memusnahkan obat yang rusak dan kadaluarsa;
 - i. Melayani permintaan obat dari masyarakat (Baksos, pengobatan Gratis, Kejadian Luar Biasa/KLB, Bencana Alam) dan permintaan dari daerah/Provinsi lain yang membutuhkannya;
 - j. Melaksanakan monitoring dan Evaluasi, ketersediaan obat/perbekes serta penggunaannya di sarana pelayanan kesehatan utamanya instalasi farmasi kabupaten Provinsi Sulawesi Barat;
 - k. Melaksanakan monitoring Evaluasi penggunaan obat/perbekkes tepat

sasaran, baik di PKM maupun di sub-sub unit yang ada dibawahnya;

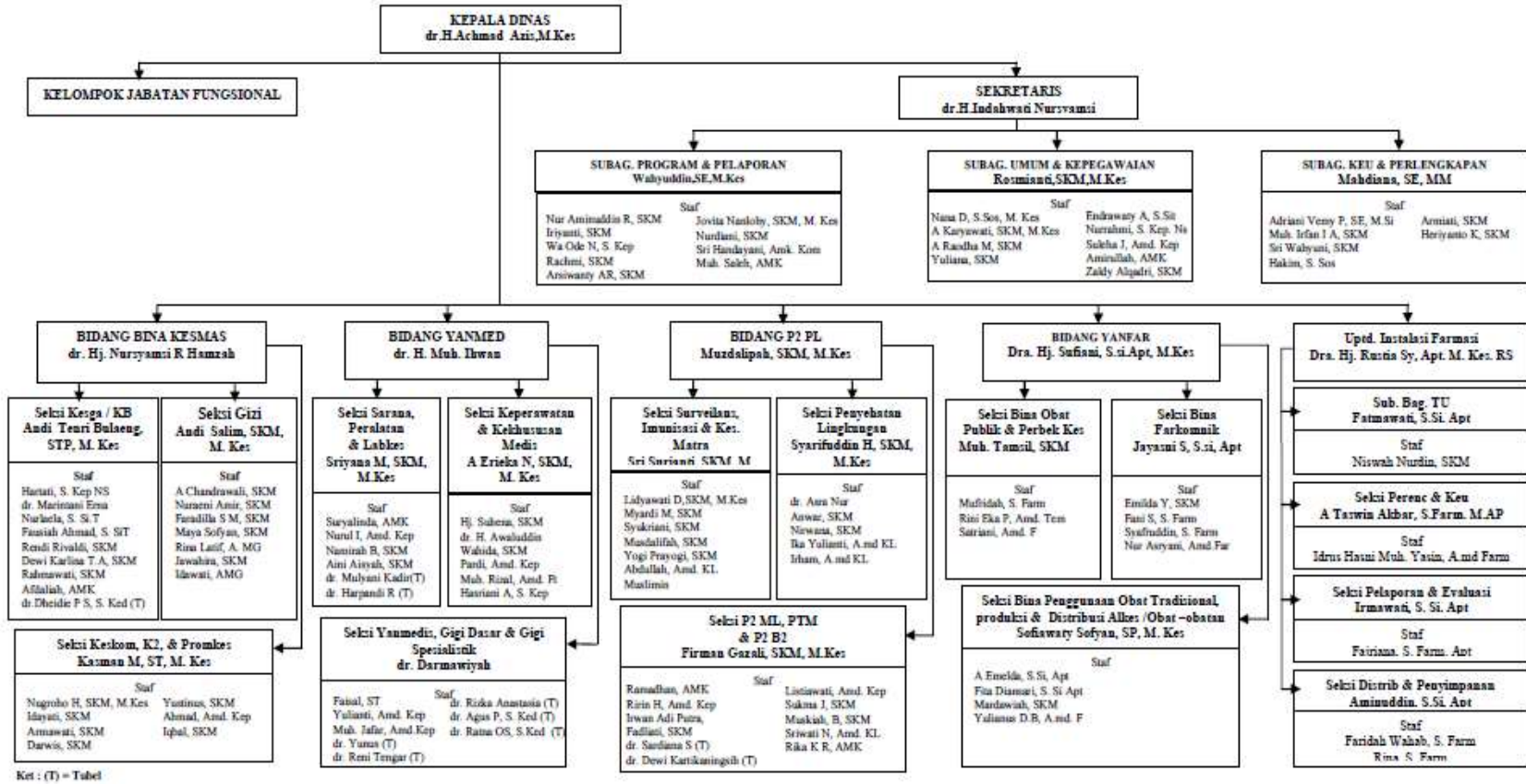
- l. Memfasilitasi pelayanan distribusi obat/perbekkes keseluruh kabupaten dan pelayanan kesehatan dasar lainnya;
 - m. Mengkoordinasikan perencanaan kegiatan dan program serta kualifikasi tenaga yang dibutuhkan dilingkup UPTD;
 - n. Melaksanakan ketatausahaan UPTD Instalasi Farmasi PROVINSI;
 - o. Membuat, mengoreksi dan memaraf naskah dinas untuk menghindari kesalahan;
 - p. Mengkoordinasikan penyusunan standar operasional kegiatan, peralatan dan ketenagaan;
 - q. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas UPTD Instalasi Farmasi dan memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan untuk penentuan kebijakan dan pengembangan UPTD kedepan,
 - r. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas
8. UPTD Instalasi Farmasi
- a. Melaksanakan pelayanan kesehatan dasar dan pemeriksaan sederhana kepada Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan keluarganya serta masyarakat di lingkungan Kantor Gubernur Sulawesi Barat;
 - b. Melaksanakan perencanaan, penyediaan obat-obatan, alat dan bahan pemeriksaan kesehatan;
 - c. Melaksanakan pelaporan ke Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat
 - d. Melaksanakan pelayanan dibidang kesehatan yaitu pelayanan kesehatan dasar berupa :
 - (1). Konsultasi, penyuluhan, pemeriksaan medis dan pengobatan
 - (2). Pemeriksaan, pengobatan, termasuk pencabutan dan tambal gigi
 - (3). Tindakan medis kecil/sederhana
 - (4). Pemeriksaan penunjang diagnostik sederhana
 - (5) Pengobatan efek samping kontrasepsi
 - (6) Pemberian obat pelayanan dasar dan bahan kesehatan habis pakai

(7) Pemeriksaan kehamilan dan persalinan

(8) Pelayanan imunisasi dasar

- e. Merencanakan dan menyediakan kebutuhan obat pelayanan kesehatan dasar dan pemeriksaan laboratorium;
- f. Melaksanakan pelaporan pelayanan kesehatan dasar
- g. Melaksanakan ketatausahaan
- h. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pelayanan unit pelaksana teknis dinas;
- i. Melaksanakan pengolahan data program pelayanan unit pelaksana teknis dinas di sarana pelayanan kesehatan dasar;
- j. Melaksanakan penyusunan bahan pengembangan akses dan kualitas pelayanan unit pelaksana teknis dinas, meliputi Sub Bagian Tata Usaha
- k. Melaksanakan fasilitasi penerapan kebijakan pelayanan unit pelaksana teknis dinas;
- l. Melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan unit pelaksana teknis dinas disarana pelayanan kesehatan dasar;
- m. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- n. Melaksanakan monitoring dan hasil Evaluasi unit pelaksana teknis dinas.

STRUKTUR DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT



Gambar 2. 1 : Struktur Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, 2011

2.3 Sumber Daya SKPD

2.3.1 Tenaga Kesehatan

Tenaga Kesehatan merupakan pendukung utama dalam pembangunan kesehatan. Jumlah dan kualitas tenaga kesehatan seharusnya sesuai dengan kebutuhan. Jumlah pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2011 sebanyak 139 orang. Dari jumlah tersebut yang mempunyai pendidikan S2 sebanyak 25 orang; pendidikan S1 sebanyak 80 orang pendidikan, D1/D3 sebanyak 32 orang, sedangkan yang mempunyai pendidikan SMA/ sederajat sebanyak 2 orang;. Ditinjau dari Pangkat/Golongan, dari 139 orang terdiri dari golongan IV sebanyak 7 orang, golongan III sebanyak 95 orang, golongan II sebanyak 37 orang.

Tabel 2.1

Pegawai Negeri Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat
berdasarkan Pendidikan yang ditamatkan pada tahun 2011

SKPD/Unit Kerja	Pendidikan				Jumlah
	SLTA	D1 s/d D3	D4/S1	S2	
1	2	3	4	5	6
Dinkes Provinsi Sulawesi Barat	2	32	80	25	139
Jumlah	2	32	80	25	139

Tabel 2.2

Pegawai Negeri Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat
berdasarkan Golongan pada tahun 2011

SKPD/Unit Kerja	Golongan			Jumlah	Ket
	II	III	IV		
1	2	3	4	5	6
Dinkes Provinsi Sulawesi Barat	37	95	7	139	
Jumlah	37	95	7	139	

2.3.2 Sarana dan Prasarana

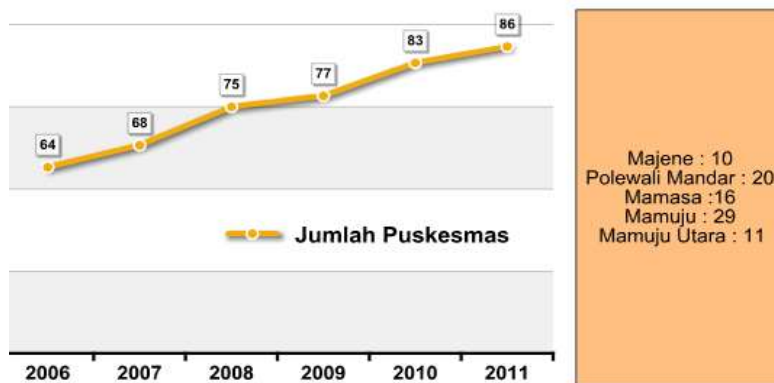
Dalam melaksanakan tugas Pelayanan Kesehatan maka Dinas Kesehatan melaksanakan tugas pelayanan kesehatan melalui sarana Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Rumah sakit dan UPTD yang merupakan sarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.

Puskesmas yang menyelenggarakan kegiatan Promosi Kesehatan, Kesehatan Lingkungan, Pelayanan Kesehatan Ibu & Anak (KIA) termasuk Keluarga Berencana (KB), Perbaikan Gizi, Pemberantasan Penyakit Menular, dan Pengobatan. Beberapa Puskesmas yaitu Puskesmas Perawatan, selain menyelenggarakan pelayanan kesehatan seperti Puskesmas pada umumnya, juga menyediakan fasilitas pelayanan rawat inap. Dengan demikian Puskesmas Perawatan juga berfungsi sebagai "Pusat Rujukan Antara" yang melayani penderita gawat darurat sebelum dirujuk ke rumah sakit. Puskesmas merupakan Unit Pelaksana Teknis dari Dinas Kesehatan kabupaten yang berada di semua wilayah kecamatan yang melaksanakan tugas-tugas operasional pembangunan kesehatan.

Gambar 2.2

Jumlah Puskesmas Sulawesi Barat

Tahun 2006-2011

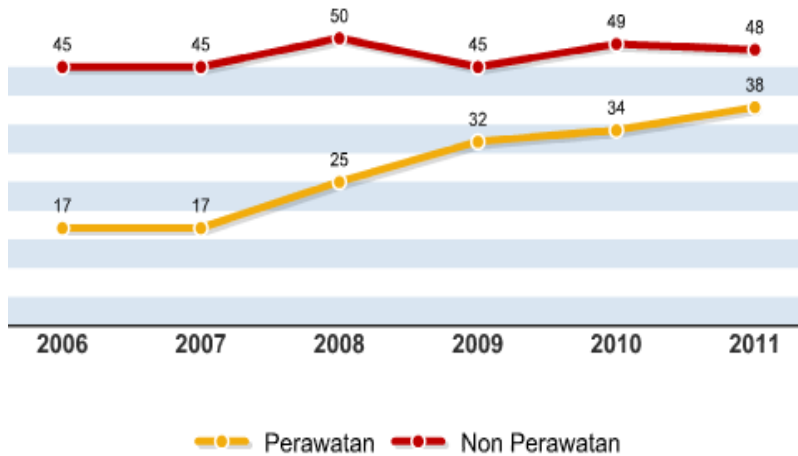


Pada tahun 2011 jumlah Puskesmas di Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 86 unit. Jika dilihat dari tahun 2006-2011 terlihat adanya peningkatan sebanyak 22 PKM baru.

Bila dilihat dari kabupaten, puskesmas terbanyak berada di kabupaten Mamuju sebanyak 29 Unit dan paling sedikit di Kabupaten Majene 10 unit Puskemas.

Puskesmas di Sulawesi barat terdiri atas dua jenis yaitu Puskesmas Perawatan dan non Perawatan. pada tahun 2011 Puskesmas Perawatan sebanyak 38 Unit dan puskesmas Non perawatan 48 Unit.

Untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan di puskesmas, maka kedepan puskesmas non perawatan akan ditingkatkan menjadi puskesmas perawatan.

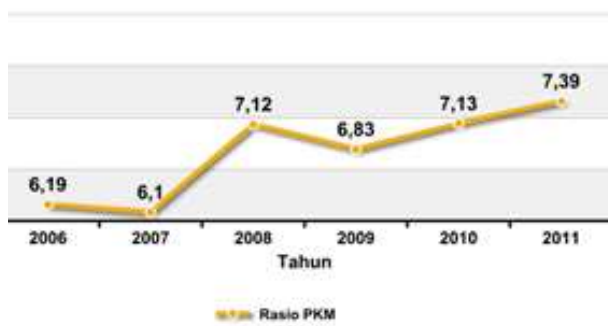


Gambar 2.3: Jumlah Puskesmas Perawatan dan Non Perawatan tahun 2006 - 2011

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui keterjangkauan penduduk terhadap puskesmas adalah rasio Puskesmas per 100.000 penduduk. Dalam kurun waktu 2006 hingga 2010 menunjukkan adanya perkembangan rasio secara fluktuatif. Rasio Puskesmas pada tahun 2006 sebesar 6,19, pada tahun 2010 meningkat menjadi 7,13 dan meningkat menjadi 7,39 pada tahun 2011

Gambar 2.4 :

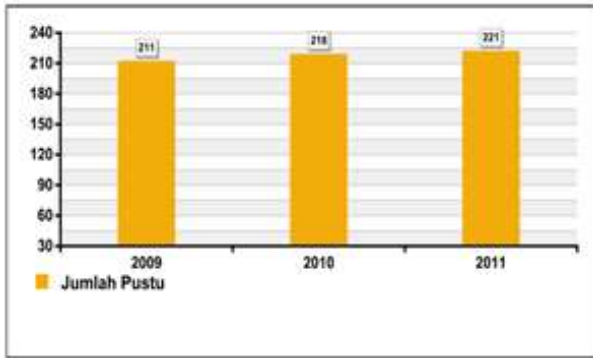
Rasio Puskesmas Per 100.000 Penduduk Sulawesi Barat Tahun 2006 – 2011



Sumber : Profil Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2011

Gambar 2.5:

Jumlah Pustu Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 – 2011

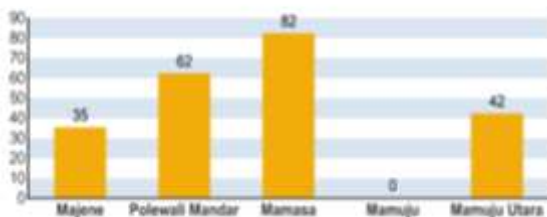


Sumber : Profil Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2011

Untuk meningkatkan jangkauan pelayanan Puskesmas terhadap masyarakat di wilayah kerjanya, puskesmas di dukung sarana pelayanan kesehatan berupa puskesmas pembantu (pustu). Jumlah pustu pada tahun 2011 dilaporkan sebanyak 221 buah meningkat dibandingkan tahun 2010 sebesar 218 Pustu. Mamasa menjadi kabupaten dengan jumlah pustu terbanyak 82 buah dan Kabupaten Mamuju tidak memiliki Pustu karena adanya peraturan Pemerintah Daerah Mamuju yang merubah status Puskesmas pembantu menjadi poskesdes.

Gambar 2.6

Jumlah Puskesmas Pembantu menurut Kabupaten Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011



Sumber : Profil Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, 2011

Puskesmas pembantu dibangun sebagai strategi untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Pada Pustu ditempatkan bidan Desa dan Perawat PTT yang diangkat melalui SK penugasan Kementerian Kesehatan dan dari Pemerintah Kabupaten.

Puskesmas juga memiliki sarana lain berupa Puskesmas keliling yang dilengkapi dengan kendaraan bermotor roda 4. Jumlah Puskesmas keliling di Provinsi Sulawesi Barat yang dimiliki Puskesmas sebanyak 81 Buah. Sehingga ada 5 Puskesmas yang belum memiliki Puskesmas Keliling. Puskesmas yang tidak memiliki rata-rata adalah Puskesmas dengan kondisi geografis sulit yang tidak dapat diakses dengan kendaraan roda 4. Sehingga perlu ada strategi lain dalam penanganan kesehatan di daerah terpencil.

Tabel 2.3

Sarana dan Prasarana Unit Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011

SKPD/Unit Kerja	Mobil	Motor
1	2	3
Dinkes Provinsi Sulawesi Barat	19	268
Jumlah	19	268

2.3.3 Realisasi Anggaran

Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan kegiatan pembangunan kesehatan dengan biaya dari APBD Provinsi dan APBN serta dari bantuan/pinjaman luar negeri (pinjaman pemerintah pusat).

Tabel 2.4

Anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Menurut Sumbernya tahun 2011

Keterangan	APBN	APBD		
		Tidak Langsung	Langsung	Total
Dinkes Provinsi Sulawesi Barat	12.503.261.000	4.452.952.120	7.430.075.150	11.883.027.270
Jumlah	12.503.261.000	4.452.952.120	7.430.075.150	11.883.027.270

Sumber : LAKIP Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, 2011

Tabel 2. 5
Alokasi dan Realisasi Anggaran APBD tahun 2007-2012
Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat

TAHUN	BELANJA	ALOKASI	REALISASI	%
2	3	4	5	6
2007	- Langsung	6.658.345.000	6.491.513.136	97,49
	- Tidak Langsung	-	-	#DIV/0!
2008	- Langsung	8.290.000.000	8.100.885.835	97,72
	- Tidak Langsung	2.259.009.025	2.194.665.203	97,15
2009	- Langsung	9.386.349.000	8.348.336.788	88,94
	- Tidak Langsung	2.569.519.994	2.986.327.476	116,22
2010	- Langsung	8.002.539.500	7.340.217.686	91,72
	- Tidak Langsung	3.836.386.187	3.498.182.892	91,18
2011	- Langsung	7.430.075.150	7.033.623.473	94,66
	- Tidak Langsung	4.452.952.120	4.361.090.042	97,94
2012	- Langsung	8.370.488.500	-	-
	- Tidak Langsung	5.788.837.756	-	-
	Jumlah	67.044.502.232	50.354.842.531	75,11

Sumber : LAKIP Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, 2011

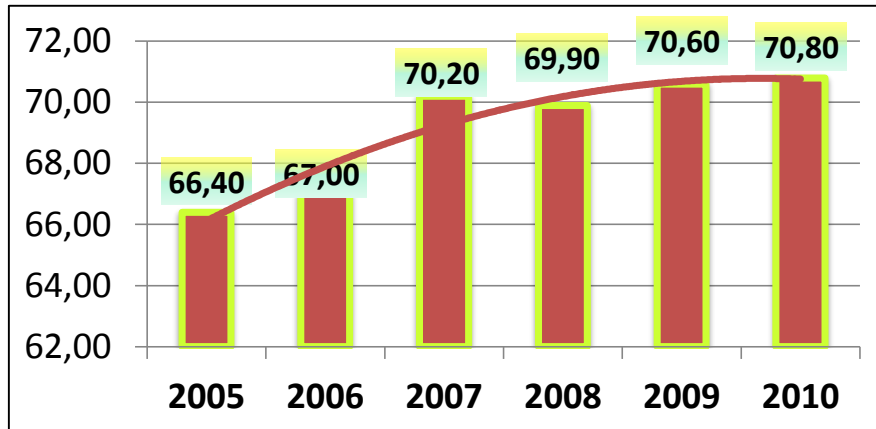
2.4 Kinerja Pelayanan SKPD

Indikator yang dinilai paling peka dan telah disepakati secara nasional sebagai ukuran derajat kesehatan suatu wilayah meliputi : (1) Umur Harapan Hidup, (2) Angka Kematian Ibu, (3) Angka Kematian Bayi, (4) Angka Kematian Balita, dan (5) Status Gizi Balita / bayi.

2.4.1 MORTALITAS

a. Umur Harapan Hidup (UHH)

Peningkatan umur harapan hidup di Sulawesi Barat selama 5 tahun terakhir cenderung meningkat. Berikut gambaran perkembangan Usia Harapan Hidup di Sulawesi Barat sampai dengan tahun 2010



Gambar 2.7 : Umur Harapan Hidup Penduduk Sulawesi Barat tahun 2005 – 2010
(sumber : BPS Sulawesi Barat)

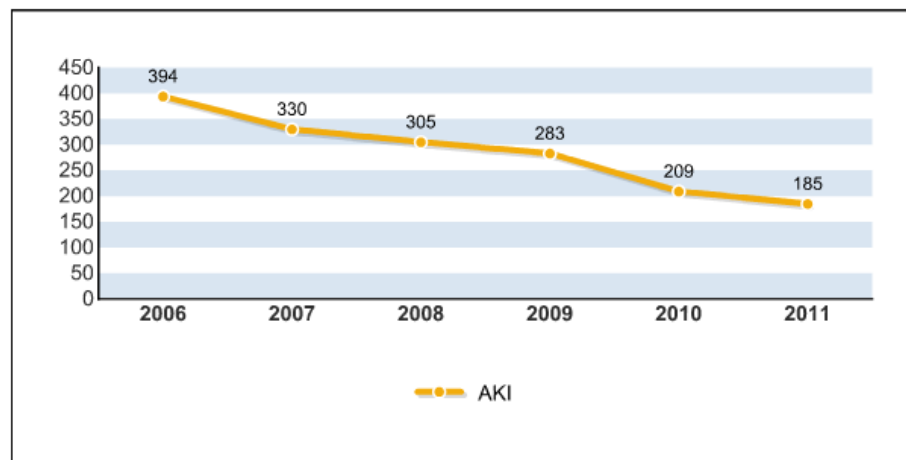
Tahun 2010, umur harapan hidup masyarakat Sulawesi Barat telah meningkat mencapai 70,80 tahun. Terjadi peningkatan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan 5 tahun sebelumnya yang baru mencapai 66,40 tahun 2005. Dengan perkembangan tersebut, perhitungan prediksi angka umur harapan hidup Sulawesi Barat pada tahun 2013 diharapkan akan mencapai 72 tahun (Estimasi Dinkes). Gambaran perkembangan tersebut memperlihatkan telah terjadinya transisi demografi di Sulawesi Barat yang sebenarnya telah dimulai pada masa 2000-an yang ditunjukkan dengan semakin meningkatnya usia lanjut.

Peningkatan umur harapan hidup ini dipengaruhi oleh multifaktor yang dalam hal ini kesehatan menjadi salah satu yang berperan penting didalamnya. Peran pengaruh kesehatan ditunjukkan dari semakin menurunnya angka kematian, perbaikan sistem pelayanan kesehatan dan perbaikan gizi di masyarakat.

b. Angka Kematian Ibu

Kematian ibu telah menunjukkan penurunan signifikan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, meskipun demikian angkanya masih cukup tinggi. Data kematian ibu dalam 5 tahun terakhir menunjukkan penurunan yang cukup baik. Tahun 2006 angka kematian ibu di Sulawesi Barat berada pada angka

394/100.000 kelahiran hidup dan mengalami penurunan menjadi 185/100.000 kelahiran hidup pada tahun 2011



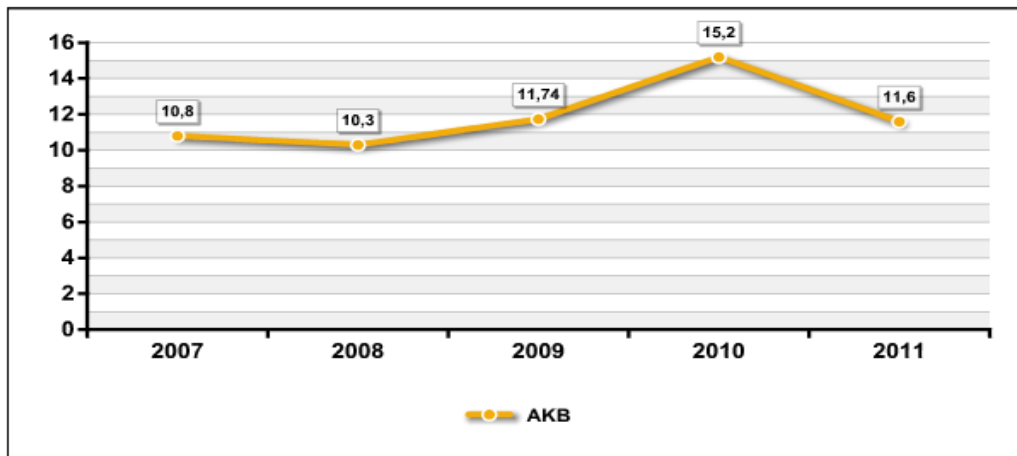
Gambar 2.8 : Angka Kematian Ibu Sulawesi Barat tahun 2006 – 2011)
(sumber : Profil Dinkes Sulawesi Barat 2011, Laporan Program Kesehatan Ibu)

Periode tahun 2006 – 2011 terjadi penurunan Angka Kematian Ibu. Angka Kematian Ibu tahun 2010 masih berada pada angka 185 / 100.000 kelahiran hidup. AKI tahun 2009-2011 tersebut telah lebih baik jika dibandingkan AKI nasional 228/100.000 Kelahiran hidup. Meskipun Angka Kematian Ibu di Sulawesi Barat lebih baik dibanding capaian Nasional namun angka ini adalah angka Kematian Ibu hamil yang hanya tercatat di sarana kesehatan. Angka Kematian Ibu Sulawesi Barat masih jauh dari Target MDG's secara nasional di tahun 2015 untuk angka kematian Ibu adalah tiga perempat dari kondisi tahun 2015 yaitu 102/100.000 kelahiran hidup

c. Angka Kematian Bayi

Sebagaimana gambaran perkembangan angka kematian ibu, angka kematian bayi juga mengalami fluktuasi selama kurun 5 tahun terakhir. Namun demikian pola naik turun yang terjadi tersebut seringkali dipengaruhi oleh multi faktor seperti yang terlihat pada periode 2006 sampai dengan 2010 yang merupakan masa dimana Sulawesi Barat merupakan Provinsi yang masih baru. Hal ini mengindikasikan bahwa kemungkinan angka kematian bayi masih

dimungkinkan terjadi kenaikan jika tidak menjadi perhatian yang utama dari para pelaku kebijakan di bidang kesehatan.



Gambar 2.9

Angka Kematian Bayi Provinsi Sulawesi Barat tahun 2007– 2011)

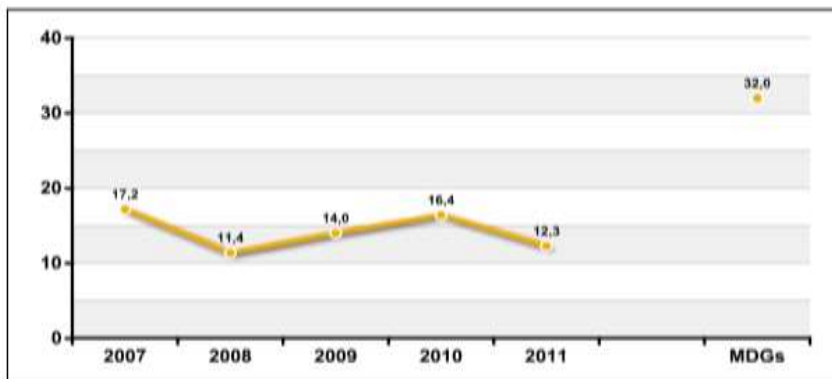
Tahun 2011, angka kematian bayi mengalami penurunan dibandingkan tahun 2010. Angka Kematian Bayi tersebut masih lebih tinggi dibandingkan dengan Angka Kematian Bayi tahun 2007 dan 2008 mencapai 10,8 / 1000 kelahiran hidup dan 10,3 kelahiran hidup. Angka kematian Bayi yang sangat fluktuatif selama kurun waktu 5 tahun terakhir tentunya menjadi sebuah masalah tersendiri dalam penanganan masalah kesehatan di Sulawesi Barat. Dengan pola yang ada tersebut maka diprediksikan pada tahun 2016 angka kematian bayi di Sulawesi Barat diprediksi akan mencapai 9,93 / 1000 kelahiran hidup. Secara Nasional, target MDG's untuk angka kematian bayi pada tahun 2015 ditargetkan akan menurun menjadi 23/1000 kelahiran hidup. Angka Kematian Sulawesi Barat telah mencapai target dalam MDGs, namun Angka Kematian Bayi disini adalah yang hanya ***tercatat di sarana kesehatan***

d. Angka Kematian Balita

Angka kematian balita di Sulawesi Barat selama kurun 4 tahun terakhir memiliki kecenderungan penurunan yang cukup baik. Tahun 2007 tercatat tingkat kematian balita yang mencapai 17,2 / 1000 balita yang ada, angka tersebut secara berangsur turun dan 4 tahun kemudian menjadi 12,3/1000 balita

Gambar 2.10

Angka Kematian Balita Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2007 - 2011



Pola penurunan terjadi dari tahun 2010 – 2011 dan sedikit berbeda pada kisaran tahun 2008 sampai dengan 2010 yang kemungkinan disebabkan oleh

adanya pelaksanaan program Kesehatan Ibu dan Anak yang semakin baik dilapangan. Dengan pola AKABA yang fluktuatif selama kurun waktu 5 tahun terakhir maka diprediksikan di tahun 2016 angka kematian balita akan mencapai 10,3/1000. Secara Nasional target MDG's untuk angka kematian balita pada tahun 2015 ditargetkan akan menurun menjadi 32/1000 kelahiran hidup Data kematian balita di sini adalah yang **tercatat di sarana kesehatan.**

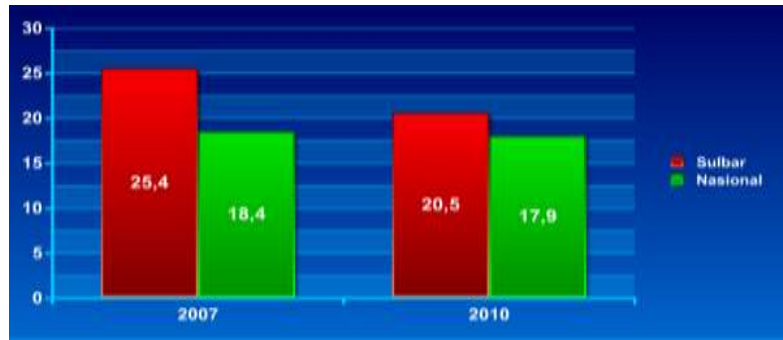
2.4.2 MORBIDITAS

a. Status Gizi

Angka gizi buruk dan gizi kurang di Sulawesi Barat selama kurun waktu 4 tahu terakhir mengalami penurunan yang cukup baik. Berdasarkan Riset Dasar Kesehatan tahun 2010 prevalensi balita gizi buruk dan kurang menurun sebanyak 4 persen yaitu dari 25,4 persen pada tahun 2007 menjadi 20,5 persen pada tahun 2010.

Prevalensi gizi buruk dan kurang Sulawesi Barat pada tahun 2010 masih tinggi dibandingkan angka nasional 17,9%. Masih tingginya Prevalensi gizi buruk di Sulawesi Barat tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam mencapai target MDG's.

Gambar 2.11 :
Gambaran Status
Gizi Balita di
Provinsi Sulawesi
Barat
tahun 2007 dan 2010



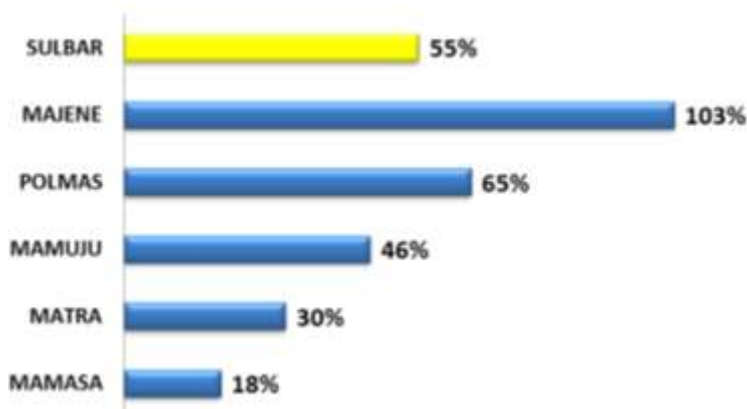
(Sumber Riskesdas 2007 dan 2010)

Penurunan kasus Gizi buruk dan gizi kurang merupakan salah satu prioritas pembangunan kesehatan nasional tahun 2010 – 2014. Meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat yang ditunjang berbagai upaya promotif, preventif dan kuratif serta meningkatnya peran serta masyarakat telah berhasil menurunkan kasus gizi buruk pada balita. Pencapaian ini belum mencapai Target Millennium Development Goals atau MDGs pada tahun 2015 yaitu 18,5%.

b. Penyakit Menular

Penyakit–penyakit yang sudah menurun seperti tuberkulosa paru dan malaria, masih memiliki potensi untuk meningkat kembali (*re-emerging*) mengingat kondisi perilaku dan lingkungan (fisik, ekonomi, sosial, budaya) masyarakat yang kurang mendukung.

Kualitas pengobatan TBC di Sulawesi Barat meskipun dari tahun ke tahun terus meningkat namun tetap masih rendah yaitu 55% dari target Penemuan Kasus Baru BTA Positif (CDR) dengan target Nasional adalah minimal 70%).



Gambar 2.12

Angka Penemuan penderita baru BTA Positif (CDR) Sulawesi Barat tahun 2011

Permasalahan lain adalah adanya ketimpangan pencapaian Kabupaten yang

melampaui target (Majene 103%) dan disisi yang lain ada kabupaten yang pencapaiannya jauh di bawah (mamasa 18%). Penemuan penderita juga masih belum mencapai target Nasional . Pencapaian Sulawesi Barat saat ini 55% dari target 70%). Penderita TBC yang tidak sembuh atau penderita yang tidak memperoleh pengobatan karena belum ditemukan, merupakan sumber penular yang mengancam pencapaian derajat kesehatan.

Sementara itu kematian dan kesakitan akibat penyakit infeksi saluran pernafasan, menjadi penyebab kematian terbesar dan memiliki kecenderungan peningkatan. Penyakit TBC memegang peran penting kasus kesakitan dan kematian penyakit saluran pernafasan tersebut dan bertanggungjawab terhadap kecenderungan peningkatannya mengingat sifat penularan dan perilaku masyarakat

Penyakit malaria telah menurun dengan sangat signifikan dalam lima tahun terakhir. Namun demikian masih ditemukan adanya kasus penularan malaria Kabupaten Mamuju dan Mamuju Utara merupakan Kabupaten dengan daerah endemis tinggi di Sulawesi Barat. Dengan demikian kemungkinan perkembangan penyakit ini masih tetap tinggi.

2.5 Capaian Kinerja Pelayanan SKPD

Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat kurun waktu dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2011 dapat dilihat dalam table-tabel berikut:

Tabel : 2.6

Capaian kinerja Dinas Kesehatan tahun 2006 – 2011

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	Rasio posyandu per satuan balita	8,15	12,71	10,68	10,63	12,46	13,13
2	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	0,79	0,24	0,23	0,48	0,51	0,55
3	Rasio Rumah Sakit Per satuan penduduk	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
4	Rasio Dokter Per satuan penduduk	0,10	0,15	0,15	0,21	0,26	0,17
5	Rasio Bidan Per Satuan Penduduk	25,56	24,91	29,43	30,76	87	68
6	Rasio tenaga Perawat Per Satuan penduduk	76,99	73,08	89,93	92,98	113	112
7	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	30,1	30,1	63,63	46,31	50,96	59,28
8	Cakupan pertolongan oleh nakes yang memiliki kompetensi kebidanan	69	74	63	66	73	75,2
9	Cakupan Desa / kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	42,99	21,64	34,4	43,78	65,56	65,1
10	Cakupan Balita Gizi buruk mendapat perawatan	81,28	46,54	66,59	81,47	100	100
11	Cakupan penemuan dan penanganan penderita TB BTA +	49	35	47	45	48,26	55
12	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	-	-	72,7	98,34	97,13	100
13	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	-	-	-	4,71	1,14	1,7
14	Cakupan kunjungan bayi	43,99	66,99	70,38	71,44	82,2	88,5
15	Cakupan Puskesmas	1,16	1,17	1,14	1,17	1,22	1,25
16	Cakupan Puskesmas Pembantu	11,66	23,39	29,91	34,99	36,15	36,65

2.6 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Salah satu metode yang dipergunakan untuk melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal adalah metode SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats*). Dengan metode SWOT ini, identifikasi lingkungan yang ada di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai berikut:

STRENGTH (O/Opportunities)

1. Adanya dukungan dana APBN dan APBD secara rutin
2. Tersedianya data rutin program
3. Kerjasama antara pengelola program provinsi dan kabupaten baik
4. Kebijakan pimpinan mendukung
5. Perencanaan satu pintu dan E-Planning
6. SDM cukup berdasarkan jenis dan tingkat pendidikan
7. Tersedianya sarana dan prasarana

WEAKNESS (O/Opportunities)

1. Distribusi dana APBN dan APBD tidak tersebar sesuai peruntukannya
2. Keterlambatan data dan kualitas data berkurang
3. Seringnya terjadi pergeseran job sebelum regenerasi
4. Perencanaan masih segmentasi
5. SDM berdasarkan jumlah, kualitas dan distribusi kurang
6. Belum memadainya sarana dan prasarana dari jumlah, jenis dan kualitas
7. Kerjasama lintas bidang / lintas program kurang
8. Komitmen / dedikasi petugas masih kurang
9. Banyak program yang tidak bisa dilaksanakan
10. Koordinasi antar pengambil kebijakan lintas program kurang
11. Struktur dan tupoksi kurang jelas
12. Kondisi fisik dan lingkungan kantor yang kurang representative
13. Pengelolaan obat tidak satu pintu

PELUANG (O/Opportunities)

1. Sesuai dengan visi dan misi Gubernur Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional
2. Kemitraan dengan lembaga lain misalnya UNICEF, NLR, GF, YASMIB dan WHO

3. Kesehatan merupakan salah satu prioritas
4. Target MDGs : 1,2,3,4,5 dan 6
5. Adanya bantuan dana Dekonsentrasi, Bantan Operasional Kesehatan (BOK), Dana Alokasi Khusus (DAK), Jamkesmas, Jampersal dan Tugas Pembantuan
6. Adanya program PKH (Program Keluarga Harapan)
7. Adanya program PNPM
8. Adanya dana Alokasi Desa
9. Eksplorasi minyak bumi
10. Adanya program bedah desa
11. Pemberian makanan tambahan dari dinas pendidikan
12. Program PAUD
13. Komisi IV DPR
14. Koordinasi dengan BAPPEDA
15. Pertumbuhan ekonomi tinggi 13%
16. Kepadatan penduduk rendah

ANCAMAN (*T/Threats*)

1. Provinsi Sulawesi Barat termasuk Kategori Daerah Bermasalah Kesehatan (DBK)
2. Kondisi geografis
3. Infrastruktur yang belum memadai
4. Penyakit infeksi masih tinggi
5. Pendapatan per kapita masih rendah
6. Sulawesi Barat merupakan daerah transit
7. Krisis ekonomi
8. Rencana kenaikan BBM
9. SDM yang kurang memadai
10. Rendahnya perilaku kesehatan, moral dan etika
11. Sarana kesehatan belum memadai
12. Usia perkawinan dini masih tinggi
13. Jumlah anak rata – rata dalam satu keluarga 4 (empat)
14. Curah hujan tinggi

**BAB III
ISU STRATEGIS
BIDANG KESEHATAN**

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Hasil analisis perkembangan dan masalah kesehatan selanjutnya dipadukan dengan batasan tugas dan peran Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat serta dengan memperhatikan perkembangan dan tantangan yang mutakhir dewasa ini, maka isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai berikut :

3.1.1 Derajat Kesehatan

a. Kesenjangan Derajat Kesehatan

Derajat kesehatan di Sulawesi Barat masih rendah namun telah mengalami kemajuan. MDG's (Millenium Development Goal's) merupakan target global dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk dunia. MDG's telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dan menjadi salah satu agenda penting dalam pembangunan kesehatan di seluruh Indonesia. Indikator pokok MDG's merupakan komponen utama dalam derajat kesehatan, sehingga upaya pencapaian target MDG's akan berarti pula sebagai upaya untuk menyelaraskan derajat kesehatan dan kesejahteraan di tingkat global.

b. Permasalahan Kesehatan Ibu

Kematian dan kesakitan penyakit berhubungan dengan persalinan (anemia, perdarahan, hipertensi, eklamsi) meskipun juga telah menunjukkan penurunan namun masih cukup tinggi dan masih tetap mengancam upaya penurunan

angka kematian ibu dan bayi. Dalam beberapa tahun terakhir angka penurunan menunjukkan stagnasi sedangkan target MDG's pada tahun 2015 masih jauh dari kondisi yang ada pada saat ini

c. Perkembangan Status Gizi Balita

Penderita gizi buruk masih dijumpai di Sulawesi Barat dan dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kecenderungan penurunan yang stagnan. Kondisi tersebut juga diperburuk dengan masih adanya potensi peningkatan penderita karena masih belum baiknya perilaku, pelayanan dan kondisi lingkungan sosial ekonomi.

e. Penyakit Menular

Kasus DBD berkurang namun tiap tahun masih tetap ditemui, sementara malaria meskipun telah menurun tetapi kasus indigenous masih ditemukan. Penyakit TBC diduga menjadi pemicu tingginya kematian akibat gangguan pernafasan di Sulawesi Barat. Namun penemuan penderita masih belum sesuai harapan dan tingkat kesembuhan juga belum maksimal. Kasus HIV AIDS semakin meningkat, tingginya kasus diare akibat sanitasi lingkungan yang masih rendah.

3.1.2 Aksesibilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan

a. Mutu Upaya Pelayanan Kesehatan

Meskipun jumlah fasilitas pelayanan kesehatan di Sulawesi Barat terus meningkat namun distribusinya belum merata. Mutu pelayanan juga belum optimal ditunjukkan dari belum maksimalnya pencapaian upaya yang menyeluruh, terpadu dan sustainabel sementara Upaya Kesehatan Berbasis

Masyarakat belum banyak berperan. Tuntutan kesetaraan mutu semakin mengemuka bahkan sampai ke tataran regional seperti tergambar dari fenomena berobat ke luar negeri. Di sisi lain disparitas masih pula dijumpai dimana hambatan ekonomi masih menjadi penyebab masalah aksesibilitas kelompok tidak mampu yang tergambar dari belum seluruh penduduk belum memiliki jaminan kesehatan.

b. Kemandirian dan Peran Serta Masyarakat

Provinsi Sulawesi Barat memiliki peluang dan keuntungan yang lebih baik dengan keberadaan akses sarana pelayanan kesehatan yang cukup baik meskipun belum sepenuhnya merata. Namun demikian konsep kemitraan UKBM dengan unit pelayanan kesehatan masih belum berjalan baik dan terkadang masih menempatkan masyarakat sebagai objek ketimbang subjek. Peran aktif masyarakat yang meliputi pengabdian, advokasi, dan pengawasan belum berjalan maksimal

Visi sehat pada masa mendatang akan bertumpu kepada pencapaian Desa Sehat yang dimulai pada lingkup keluarga. Strategi khusus yang telah dikembangkan di Sulawesi Barat melalui Dusun / RW Siaga dengan lima tatarannya yang telah disepakati sebagai strategi integratif untuk mendukung upaya penanganan berbagai masalah kesehatan dengan basis UKBM. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih dalam tataran konseptual dan belum memiliki kemandirian manajerial yang memadai untuk mendukung peningkatan aksesibilitas pelayanan.

Hasil analisis perkembangan dan masalah kesehatan selanjutnya dipadukan dengan batasan tugas dan peran Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat serta dengan memperhatikan tugas dan fungsi yang ada.

c. Manajemen Perencanaan

Sistem perencanaan dan penganggaran Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat belum optimal. Salah satu sebabnya adalah orientasi perencanaan yang masih didominasi oleh pekerjaan administratif dan belum seimbang dengan kewajibannya untuk memfasilitasi pengembangan arah dan kebijakan pembangunan kesehatan. Kurangnya dukungan informasi kesehatan yang memadai di berbagai unit, menyebabkan perencanaan berbasis bukti masih hanya sebatas wacana. Sementara permasalahan wacana juga masih terjadi dalam mengimplementasikan perencanaan berbasis kinerja. Kewajiban penyusunan perencanaan kinerja masih terabaikan dan masih sangat didominasi pekerjaan penganggaran, yang berdampak antara lain kesulitan dalam menilai performa dan arah pembangunan kesehatan.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Pemerintah daerah

Visi Pemerintah Sulawesi Barat 2011-2016

"Terwujudnya percepatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat Sulawesi Barat pada tahun 2016"

Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka disusunlah Misi sebagai landasan kebijakan strategis dalam pencapaian tujuan pada akhir masa bakti Gubernur di tahun 2016, yaitu:

1. Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Pemerintahan Daerah. Misi ini terfokus pada peningkatan kapasitas, kompetensi dan etos profesional aparatur pemerintah daerah dalam melaksanakan pelayanan masyarakat dan pelaksanaan kebijakan pemerintah sesuai tugas pokok dan fungsi serta visi yang diemban SKPD.
2. Memperluas dan Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Ekonomi. Misi ini terfokus pada pengembangan sarana ekonomi vital yang memiliki dampak signifikan terhadap pengembangan agroindustri, industri pertambangan minyak, gas dan mineral serta volume perdagangan yang kesemuanya dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi secara berkualitas dan berkelanjutan yang dapat dinikmati berbagai unsur masyarakat.
3. Meningkatkan Akses, Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Kualitas Hidup. Misi ini terfokus pada upaya melaksanakan peningkatan kualitas kesehatan dan kualitas hidup terkait dengan pembentukan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. Berbagai upaya tersebut bermuara pada perbaikan kualitas hidup khususnya dengan memperkecil angka penduduk miskin dan pengangguran.
4. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan. Misi ini terfokus pada upaya melaksanakan peningkatan kualitas pendidikan yang utuh dan terpadu, khususnya pada penerapan kurikulum nasional berbasis sekolah, pembinaan moral, budi pekerti, karakter, bahasa, emosional, estetika serta sikap beragama dan spiritual, apresiasi seni-budaya dan pengembangan kreativitas pemuda dan olahraga serta kesetaraan gender.

5. Penerapan Kebijakan yang Berpihak pada Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan. Misi ini terkait dengan upaya pemanfaatan sumberdaya alam yang bijaksana dan kebijakan yang menjamin daya dukung lingkungan untuk melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan.

Berdasarkan pada visi dan misi diatas maka Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat akan mendukung sepenuhnya pencapaian visi Pemerintah Sulawesi Barat tahun 2011-2016 serta mendukung pelaksanaan misi tersebut diatas berdasarkan tupoksi SKPD. Berdasarkan Tupoksi SKPD yang ada pada bagian 2.1 (halaman 8) maka Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat akan mendukung pelaksanaan misi Meningkatkan Akses, Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Kualitas Hidup. Misi ini terfokus pada upaya melaksanakan peningkatan kualitas kesehatan dan kualitas hidup terkait dengan pembentukan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. Berbagai upaya tersebut bermuara pada perbaikan kualitas hidup khususnya dengan memperkecil angka penduduk miskin dan pengangguran.

3.3. Telaahan Renstra

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Kementerian Lembaga (Renja SKPD) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat merupakan dokumen perencanaan tahunan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat yang disusun sebagai Rencana Strategis dan memuat rencana kegiatan pembangunan lima tahunan yang dilengkapi dengan formulir kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta indikasi pendanaan beberapa tahun ke depan.

Dikaitkan dengan sistem perencanaan pembangunan maka keberadaan Rencana Strategis Dinas Kesehatan ini merupakan bagian yang utuh dari manajemen kerja pembangunan kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan dalam menjalankan agenda pembangunan kesehatan yang telah tertuang dalam dokumen-dokumen perencanaan. Gambaran tentang hubungan antara Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya baik dalam kaitannya dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagai berikut

Gambar 3.13 : Sistem Perencanaan Pembangunan



3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sebagai Modal Dasar bagi perwujudan Visi dan Misi Provinsi Sulawesi Barat dalam mendukung Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat adalah strategi untuk peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah maka arah kebijakan umum dibidang kesehatan adalah dengan penguatan sumber daya bidang kesehatan yang diharapkan semakin

meningkatnya angka harapan hidup masyarakat dan semakin berkurangnya angka penduduk miskin serta pengangguran.

Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Provinsi dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, dan kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Strategi pengembangan kawasan strategis Provinsi Sulawesi Barat dari sudut pandang kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi: mengembangkan produktifitas sentra-sentra produksi pertanian, perikanan, serta agro industri dan agribisnis; Membangun prasarana wilayah pendukung kegiatan produktif; mengembangkan dan meningkatkan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian Provinsi yang produktif, efisien, dan mampu bermitra sejajar dalam perekonomian nasional atau internasional; mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumberdaya alam dan kegiatan budidaya unggulan sebagai penggerak. Strategi pengembangan yang dilakukan perlu diimbangi dengan peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan melalui pendekatan sarana pelayanan kesesehatan dan peningkatan kualitas petugas pelayanan kesehatan

3.5. Penentuan Issue Strategis

Berdasarkan pada gambaran pelayanan SKPD pada Bab II dan permasalahan Pada Bab III bagian 3.1 maka issue strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat yang teridentifikasi adalah sebagai berikut :

- 1) Masih tingginya Angka Kematian bayi dan Ibu
- 2) Terbatasnya aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, terutama pada kelompok rentan seperti: penduduk miskin, daerah tertinggal, terpencil, dan kepulauan

- 3) Belum teratasinya permasalahan gizi secara menyeluruh.
- 4) Masih tingginya kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular.
- 5) Sanitasi lingkungan yang masih rendah
- 6) Belum terpenuhinya jenis, kualitas serta penyebaran sumber daya manusia kesehatan dan belum optimalnya dukungan kerangka regulasi ketenagaan kesehatan
- 7) Permasalahan manajerial dalam sinkronisasi perencanaan kebijakan, program, dan anggaran serta masih terbatasnya koordinasi dan integrasi Lintas Sektor.
- 8) Belum optimalnya ketersediaan pemerataan dan keterjangkauan obat esensial penggunaan obat yang tidak rasional dan penyelenggaraan pelayanan kefarmasian yang berkualitas
- 9) Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan belum dilakukan secara optimal
- 10) Masih terbatasnya kemampuan manajemen dan informasi kesehatan, meliputi pengelolaan data dan informasi kesehatan

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, KEBIJAKAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

4.1 Visi dan Misi Dinas Kesehatan

<p>VISI : Terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas dan Mandiri pada tahun 2016</p>			
<p>MISI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan, memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat 2. Mengupayakan pengendalian penyakit dan penanggulangan masalah kesehatan 3. Menjamin Ketersediaan obat esensial sesuai standar 4. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. <p>Misi 1 : Mewujudkan, memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, dan terjangkau</p>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
<p>Tujuan 1 Menurunkan Angka kematian Ibu dari 185/100.000 kelahiran menjadi 102/100.000 kelahiran hidup pada tahun 2016</p>	<p>Angka Kematian Ibu menurun hingga 50% pada tahun 2016</p>	<p>Peningkatan cakupan pemeriksaan dan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan 2. Pemenuhan sarana dan tenaga kesehatan
<p>Tujuan 2 Menurunkan Angka Kematian Bayi dari 11,6 /1000 kelahiran hidup pada tahun 2011 menjadi 9,93/1000 Kelahiran hidup pada tahun 2016</p>	<p>Angka kematian Bayi menurun hingga 20% pada tahun 2016</p>	<p>Peningkatan pengetahuan dan partisipasi masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas ditingkatkan dasar maupun rujukan terutama bagi bayi</p>	<p>P4K Imunisasi Peningkatan pelayanan persalinan normal dan komplikasi dasar dengan peran PONEC dan PONEK</p>
<p>Tujuan 3 Menurunkan Angka Kematian Balita dari 12,1 /1000 kelahiran hidup pada tahun 2011 menjadi 10,3/1000 Kelahiran hidup pada tahun 2016</p>	<p>Angka kematian Balita menurun hingga 27% pada tahun 2016</p>	<p>Peningkatan pengetahuan dan partisipasi masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan balita di sarana pelayanan kesehatan</p>	<p>Peningkatan kunjungan balita ke sarana kesehatan</p>

<p>Tujuan 4 Menurunkan prevalensi Gizi buruk dari 20,5 pada tahun 2011 menjadi 15,4 pada tahun 2016</p>	<p>Prevalensi gizi buruk menurun hingga 25% pada tahun 2016</p>	<p>Peningkatan cakupan kunjungan balita ke Sarana Pelayanan Kesehatan</p>	<p>Pemantauan pertumbuhan dan deteksi dini melalui penimbangan berat badan secara rutin Pemberian makanan pendamping ASI</p>
<p>Tujuan 5 Meningkatnya Pelaksanaan Pemberdayaan dan Promosi Kesehatan Kepada Masyarakat</p>	<p>Perilaku hidup bersih dan Sehat (PHBS) pada tingkat Rumah Tangga 80 % pada tahun 2016</p>	<p>Meningkatkan upaya promosi kesehatan dalam mencapai perubahan Perilaku dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat</p>	<p>Mendorong kerjasama dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan wawasan kesehatan</p>
	<p>Persentase Desa Siaga Aktif 70% pada tahun 2016</p>	<p>Meningkatkan keterpaduan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan</p>	
	<p>Persentase sekolah dasar 35% yang mempromosikan kesehatan pada tahun 2016</p>	<p>Fasilitasi Peningkatana Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)</p>	
<p>Tujuan 6 Terselenggaranya Standarisasi dan peningkatan Mutu pelayanan Kesehatan Dasar dan rujukan</p>	<p>Persentase Puskesmas Rawat inap mampu poned menjadi 52% pada tahun 2016</p>	<p>Meningkatkan pelayanan Kesehatan kepada masyarakat</p>	<p>Peningkatan kapasitas petugas di Puskesmas</p>
	<p>Persentase Rumah Sakit Provinsi / Kab yang menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit</p>	<p>Meningkatkan Pembinaan pelayanan kesehatan rujukan</p>	<p>Peningkatan sosialisasi kebijakan standar pelayanan Rumah Sakit</p>
	<p>Persentase RS Provinsi/Kab terakreditasi</p>	<p>Meningkatkan Pembinaan pelayanan kesehatan rujukan</p>	<p>Peningkatan kapasitas petugas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit</p>

MISI 2 : Mengupayakan pengendalian penyakit dan penanggulangan masalah kesehatan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Mencegah, menurunkan dan mengendalikan penyakit menular dan tidak menular serta masalah kesehatan lainnya.	1. Menurunkan Angka Penemuan kasus malaria menjadi 1,5 per 1000 penduduk pada tahun 2016	Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi ancaman penyakit	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit diselenggarakan dalam upaya untuk pencegahan dan pengendalian penyakit yang sinergis, komprehensif dan bermutu
	2. Meningkatkan Persentase kasus TB baru (BTA) positif yang disembuhkan menjadi 75% pada tahun 2016	Peningkatan upaya pemerintah dan masyarakat dalam pemberantasan dan pencegahan penyakit.	
	3. Persentase desa UCI menjadi 100% pada tahun 2016	Meningkatkan peran lembaga pemerintah, media, non pemerintah (NGO) dalam kegiatan mengurangi faktor risiko.	
	4. Persentase Kabupaten melaksanakan Pembinaan Kesehatan Kerja dan pengobatan alternatif mencapai 100% pada tahun 2016	Peningkatan kualitas SDM kesehatan dalam Kesehatan kerja dan mendorong penggunaan obat komplementer	

MISI 3 : Menjamin Ketersediaan obat esensial sesuai standar			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Meningkatnya sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar dan terjangkau oleh masyarakat.	Persentase ketersediaan obat dan vaksin sebesar 100%.	Meningkatkan ketersediaan, dan keterjangkauan obat, terutama obat esensial generik.	Menjamin ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat melalui peningkatan akses obat bagi masyarakat luas

MISI 4 :: Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Meningkatnya kualitas manajemen dan perencanaan bidang kesehatan	100% dokumen perencanaan dan anggaran tersusun sesuai standar.	Peningkatan manajemen kesehatan	pengembangan kebijakan dan manajemen kesehatan
	100% Kabupaten melaksanakan Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin	Mendorong kabupaten dalam pelaksanaan jaminan Pelayanan kesehatan	Sinergitas antara provinsi dan kabupaten dalam persiapan SJSN tahun 2014
	100% Provinsi dan Kabupaten menyusun PHA dan DHA setiap tahun	Penyusunan PHA dan DHA setiap tahunnya di tingkat provinsi dan kabupaten	Melakukan advokasi terhadap kabupaten dalam penyusunan DHA
	100% Provinsi dan kabupaten dengan daerah bermasalah Kesehatan (DBK) mendapat fasilitasi Penanggulangan DBK	Penyusunan Kebijakan dalam mendorong Peningkatan pelaksanaan DBK	Kalakarya Kesehatan dan mendorong keterlibatan lintas sector dalam penanganan masalah kesehatan

Meningkatnya kualitas Sumber daya kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang lulus uji kompetensi berizin	Registrasi tenaga kesehatan	Mendayagunakan tenaga kesehatan yang kompeten sesuai kebutuhan.
Tersusunnya data dan informasi kesehatan yang akurat, akuntabel, lengkap dan tepat waktu	100% Kabupaten dan provinsi menyusun Profil Kesehatan dan memiliki Sistem Informasi Kesehatan	Pengumpulan data Kesehatan dan pengembangan jaringan Sistem Informasi Kesehatan berbasis teknologi	Penyusunan Profil Kesehatan berbasis data terpilah dan pengembangan Jaringan Sisten Informasi Kesehatan

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Tujuan	Sasaran	TAHUN					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Meningkatkan Usia Harapan hidup dari 70,80 pada tahun 2011 menjadi 72 pada tahun 2016	Meningkatnya Usia Harapan Hidup Sulawesi barat menjadi 72 pada tahun 2016	70,8	70,85	70,95	70,95	71,5	72
Menurunkan Angka kematian Ibu dari 185/100.000 kelahiran menjadi 102/100.000 kelahiran hidup pada tahun 2016	Angka Kematian Ibu menurun hingga 50% pada tahun 2016	185	63	65	67	70	102
Menurunkan Angka Kematian Bayi dari 13,2 /1000 kelahiran hidup pada tahun 2011 menjadi 9,93/1000 Kelahiran hidup pada tahun 2016	Angka kematian Bayi menurun hingga 20% pada tahun 2016	11,6	11,4	11,2	10	9,95	9,93
Menurunkan prevalensi Gizi buruk dari 20,5 pada tahun 2011 menjadi 15,4 pada tahun 2016	Prevalensi gizi buruk menurun hingga 25% pada tahun 2016	20,5	19,5	18	17,5	16,4	15,4

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

5.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka berdasarkan kategori Fungsi, Kesehatan memiliki program dan kegiatan sebagai berikut :

5.1.1. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

- 1) Perawatan secara berkala bagi ibu hamil dan WUS bagi keluarga kurang mampu
- 2) Program Perencanaan Persalinan dan Penanganan Komplikasi (P4K)
- 3) Advokasi dan pembentukan rumah tunggu bagi ibu hamil risti dan seluruh ibu hamil di daerah geografis sulit tanpa fasilitas kesehatan di kabupaten
- 4) Peningkatan kemampuan petugas dalam Asuhan persalinan Normal
- 5) Evaluasi pasca latih
- 6) Orientasi dan peningkatan pelaksanaan kemitraan bidan dan dukun
- 7) Supervisi pembinaan teknis pasca pelatihan
- 8) Orientasi peningkatan kemampuan petugas dalam penanganan kegawatdaruratan kebidanan oleh SpOG
- 9) Orientasi peningkatan kemampuan petugas pelaksanaan ANC terpadu
- 10) Orientasi kelas ibu hamil
- 11) Orientasi kelas ibu hamil
- 12) Pembinaan PKM dalam pelaksanaan pemantauan wilayah setempat (PWS) termasuk layanan swasta
- 13) Monitoring dan evaluasi Program KIA

- 14) RR KB
- 15) Peningkatan kemampuan petugas dalam penggunaan ABPK
- 16) Peningkatan kemampuan petugas dalam manajemen KB
- 17) Orientasi Bikor dalam melaksanakan supervise fasilitatif
- 18) Peningkatan Kemampuan Petugas Dalam Manajemen BBLR
- 19) Peningkatan Kemampuan Petugas Dalam Manajemen Asfiksia
- 20) Peningkatan kemampuan tenaga kesehatan (Dokter, Bidan dan perawat dalam memberikan pelayanan neonatal)
- 21) Orientasi Peningkatan kemampuan petugas dalam penanganan kegawatdaruratan neonatal oleh SpA
- 22) Pelayanann Kesehatan Bayi Anak dan Balita dari keluarga kurang mampu
- 23) Supervisi Pembinaan Tekhnis Penurunan AKB dan AKABA terintergrasi
- 24) Pengadaan Buku Kohort Bayi dan Balita
- 25) Orientasi Kelas Ibu Balita
- 26) Pengadaan Paket Kelas Ibu Balita
- 27) Peningkatan Kemampuan Petugas dalam pengisian Kohort bayi dan anak balita
- 28) Pertemuan koordinasi linyas provinsi dan kabupaten program Kesehatan Anak
- 29) Peningkatan Kemampuan Petugas Dalam Manajemen SDIDTK
- 30) Peningkatan Kemampuan Petugas Dalam MTBS / MTBM

5.1.2. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

- 1) Peningkatan Kapasitas Petugas dalam Penggunaan Standar Pemantauan Pertumbuhan Balita bagi TPG
- 2) Diseminasi cakupan D/S

- 3) Pertemuan LP/LS dalam Rangka Peningkatan Cakupan Program Gizi
- 4) Pengadaan KMS
- 5) pengadaan antropometri KIT (dacing, lengthboard,microtoice)
- 6) Peningkatan Kapasitas Ptugas dalam tatalaksana gizi buruk untuk PKM perawatan
- 7) Peningkatan Kapasitas Petugas dalam tatalaksana gizi buruk untuk PKM Non perawatan
- 8) Pelacakan dan Konfirmasi Gizi Buruk
- 9) Pengadaan MP - ASI dan PMT pemulihan
- 10) Penyusunan Peta Informasi masyarakat kurang gizi
- 11) Peningkatan Kapasitas Petugas dalam Penggunaan Software Nutriclin
- 12) Pngaadaan Kapsul Vitaamin A Biru dan Kapsul Vitamin A Merah
- 13) Peningkatan Kemampuan petugas dalam konseling menyusui
- 14) Sosialisasi PP ASI
- 15) sosialisasi pencatatan dan perhitungan ASI Eksklusif sesuai buku Survailance Gizi Tahun 2012
- 16) Pertemuan Manajemen Distribusi Gizi Mikro Tablet Fe
- 17) Pertemuan Terpadu GIZI KIA dalam Peningkatan Cakupan Fe
- 18) Sosialisasi Peningkatan Cakupan Konsumsi Garam Beryodium
- 19) Sosilisasi Penanggulangan Masalah GAKY
- 20) Pemantauan garam beryodium
- 21) Pengadaan iodine test
- 22) Sosialisasi PP GAKY
- 23) Sosialisasi gernas TK Kabupaten

- 24) Sosialisasi Gernas TK kabupaten
- 25) Sosialisasi gernas Sadar Gisi melalui media elektronik
- 26) Pengadaan Madia Penyuluhan GERNAS
- 27) surveilans gizi tingkat Kabupaten
- 28) sosialisasi Web. SIGIZI
- 29) Pelatihan Penggunaan Website Sigizi Provinsi,Kab.dan Puskesmas
- 30) Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Survaliance Gizi
- 31) Pertemuan Survailance Gizi dan Pelaporan Indikator Kinerja Gizi Berbasis Gizi Net

5.1.3. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

- 1) Pertemuan Koordinasi dengan LP/LS Peningkatan Promkes Bidang PHBS
- 2) Orientasi peningkatan peran serta organisasi/kelompok masyarakat dalam mewujudkan PHBS
- 3) Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat ber PHBS
- 4) TOT Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat ber PHBS
- 5) Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat ber PHBS
- 6) Penyebaran Informasi rumah tangga ber PHBS
- 7) Peningkatan kemampuan petugas promosi kesehatan dalam meningkatkan cakupan rumah tangga ber PHBS
- 8) Monitoring dan Evaluasi pencapaian rumah tangga ber PHBS
- 9) Pertemuan pembentukan Pokjandal Desa/Keluran Siaga tingkat Provinsi
- 10) Pertemuan pembentukan Pokjandal Desa/Keluran Siaga tingkat kabupaten
- 11) Pertemuan koordinasi Pokjandal Desa/Keluran Siaga tingkat Provinsi
- 12) Pertemuan pembentukan Pokjandal Desa/Keluran Siaga tingkat kabupaten

- 13) Pertemuan koordinasi Pokjandal Desa/Kelurahan Siaga tingkat Provinsi
- 14) Pembinaan Desa Siaga Aktif tingkat Provinsi
- 15) Pertemuan Koordinasi dengan LP/LS Peningkatan Usaha Kesehatan Sekolah
- 16) Fasilitasi peningkatan Usaha Kesehatan Sekolah
- 17) Pelatihan kader educator dan konseling P3 NAPZA
- 18) Pelatihan Dokter kecil
- 19) Pelatihan kader kesehatan remaja
- 20) Lomba sekolah sehat tingkat provinsi
- 21) Sosialialiasi perumusan dan pembuatan kebijakan teknis promosi kesehatan LP/LS tingkat provinsi
- 22) Fasilitasi penyusunan perumusan dan pembuatan kebijakan teknis promosi kesehatan
- 23) Sosialisasi perumusan dan pembuatan kebijakan berwawan kesehatan
- 24) Fasilitasi dan penetapan kebijakan berwawasan kesehatan
- 25) Sosialisasi dan advokasi pelayanan kesehatan tradisional/komlementer dan alternative tingkat provinsi
- 26) Rapat Lintas Program/Lintas Sektor kesehatan tradisional/komplementer dan alternatif tingkat provinsi
- 27) Pembentukan Sentra P3T
- 28) Rapat tim pengendali Sentra P3T
- 29) Sosialisasi pedoman pelayanan kesehatan tradisional/komplemneteter dan alternative
- 30) Bimbingan teknis pelayanan kesehatan tradisional/komplemneteter dan alternative

- 31) Pengenalan metode pelayanan kesehatan tradisional/komplemner dan alternative
- 32) Fasilitasi penerapan metode pelayanan kesehatan tradisional/komplemner dan alternative
- 33) Pertemuan forum komunikasi, sosialisasi dan advokasi kesehatan kerja, perkotaan dan olahraga tingkat provinsi
- 34) Pertemuan forum komunikasi, sosialisasi dan advokasi kesehatan kerja, perkotaan dan olahraga tingkat kabupaten
- 35) Pertemuan koordinasi LS/LP kesehatan kerja, perkotaan dan olahraga tingkat provinsi
- 36) Pelatihan petugas penyelenggara POS Usaha Kesehatan Kerja tingkat provinsi
- 37) Pelatihan kader POS UKK tingkat kabupaten
- 38) Pendataan upaya kesehatan kerja
- 39) Sosialisasi sarana kesehatan (RS, Laboratorium, Gudang Farmasi, Dinas Kesehatan) Pemerintah dalam penerapakan kesehatan kerja
- 40) Pelatihan petugas dalam penerapan kesehatan kerja di RS, Laboratorium, Gudang Farmasi dan Dinas Kesehatan tingkat provinsi
- 41) Sosialisasi melaksanakan pengendalian faktor resiko dan pelayanan kesehatan penyelaman
- 42) Pelatihan petugas dalam pengendalian faktor resiko dan pelayanan kesehatan penyelaman
- 43) Fasilitasi penerapan kesehatan penerbangan di KKP Tampa Padang
- 44) Pendataan lokasi khusus dan pengungsi tingkat provinsi
- 45) Pertemuan koordinasi penerapan lokasi khusus dan pengungsi tingkat provinsi

- 46) Puskesmas yang mendapatkan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
- 47) Pertemuan perumusan dan perencanaan pedoman BOK tingkat provinsi
- 48) Fasilitasi penetapan pedoman BOK
- 49) Penggandaan dan distribusi pedoman BOK
- 50) Monitoring dan Evaluasi Program BOK
- 51) Profil pelaksanaan BOK Provinsi Sulawesi Barat
- 52) Sosialisasi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Umum (JPKMU) tingkat provinsi
- 53) Pertemuan koordinasi pelaksanaan JPKMU tingkat provinsi dan kabupaten
- 54) Pelatihan PHA tingkat Provinsi
- 55) Pengumpulan data PHA tingkat Provinsi
- 56) Fasilitasi dan penggandaan PHA tingkat provinsi
- 57) Fasilitasi pengumpulan data PHA tingkat kabupaten
- 58) Bimbingan teknis dan monitoring dan evaluasi DHA
- 59) Pertemuan perumusan kebijakan teknis pembiayaan dan jaminan kesehatan masyarakat tingkat provinsi
- 60) Fasilitasi penetapan kebijakan teknis pembiayaan dan jaminan kesehatan masyarakat tingkat provinsi
- 61) Pertemuan perumusan perhitungan kebutuhan biaya pelayanan kesehatan prioritas yang dikembangkan
- 62) Fasilitasi perhitungan kebutuhan biaya pelayanan kesehatan prioritas yang dikembangkan
- 63) Fasilitasi ketersediaan data dan kebutuhan biaya pelayanan kesehatan prioritas

64) Penggandaan dan distribusi data dan kebutuhan biaya pelayanan kesehatan prioritas

65) Pengumpulan data DHA tingkat kabupaten

66) Bimbingan teknis, Monitoring dan Evaluasi DHA

5.1.4. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

1) Peningkatan Penemuan Kasus Program Pengendalian Penyakit Malaria

2) Pengobatan kasus malaria menggunakan ACT

3) Peningkatan pencegahan kejadian malaria

4) Pendistribusian dan evaluasi kelambu berisentiksida

5) Penanganan dan penanggulangan KLB malaria

6) Peningkatan penemuan kasus program pengendalian penyakit DBD

7) Peningkatan penatalaksanaan penderita dan tersangka DBD

8) Penanganan dan penanggulangan KLB DBD

9) Peningkatan kewaspadaan program pengendalian flu burung

10) Peningkatan penatalaksanaan kasus zoonosis (Rabies, Antraks, pes dan leptospirosis)

11) Penanganan dan penanggulangan KLB zoonosis

12) Peningkatan pelaksanaan program eliminasi filariasis

13) Monitoring pelaksanaan pengobatan massal dalam eliminasi filariasis

14) Survey evaluasi endemitas filariasis kabupaten / kota endemis filariasis

15) Peningkatan manajemen pengendalian vector

16) Pemantauan jentik berkala

17) Peningkatan penemuan kasus program pengendalian Tuberkulosis

18) Peningkatan manajemen pelaksanaan program pengendalian HIV / AIDS

- 19) Peningkatan pelaksanaan ODHA mendapatkan ART
- 20) Peningkatan pengetahuan komprehensif HIV AIDS penduduk >15 tahun
- 21) Peningkatan konseling dan testing HIV AIDS bagi penduduk > 15 tahun
- 22) Peningkatan penemuan kasus program pengendalian ISPA
- 23) Penemuan dan tata laksana kasus pneumonia balita
- 24) Peningkatan penemuan penderita diare dan ISPL
- 25) Peningkatan cakupan pelayanan diare pada unit layanan kesehatan
- 26) Penanganan dan penanggulangan KLB diare
- 27) Evaluasi penggunaan oralit dan ZINK dalam pengendalian diare
- 28) Peningkatan penemuan kasus baru kusta
- 29) Evaluasi kecacatan tingkat 2 kusta
- 30) Peningkatan penemuan kasus baru frambusia
- 31) Sosialisasi dan advokasi peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok
- 32) Sosialisasi dan advokasi pelaksanaan program penyakit tidak menular
- 33) Sosialisasi program penyakit filariasis
- 34) Pelayanan TB dengan DOTS bagi petugas kabupaten
- 35) Intervensi perubahan perilaku dan manajemen program HIV / AIDS
- 36) Mini LEC Program Pengendalian Penyakit Menular
- 37) Sweeping Program Imunisasi
- 38) Pemantauan Penyimpanan dan Penanganan Vaksin (HB-O, BCG, DPT/HB 1-3, Polio 1-4, Campak)
- 39) Peningkatan Petugas tentang Surveilans Penyakit
- 40) Monitoring, evaluasi dan pelaporan
- 41) Supervisi suprtif program imunisasi

- 42) Peningkatan pengetahuan jurim tentang save injection
- 43) Sosialisasi imunisasi TT 5 dosis
- 44) Peningkatan Pengetahuan tentang Surveilans Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I)
- 45) Fasilitasi dan Pemeliharaan Coolroom
- 46) Bimbingan Teknis Program Surveilans
- 47) Dukungan operasional program imunisasi
- 48) Penyelidikan Epidemiologi & Penanggulangan KLB <24 jam
- 49) Sosialisasi kesehatan Matra
- 50) Monev program Kesehatan Haji / Pelacakan calon Jamaah berisiko
- 51) Monitoring dan Evaluasi program Imunisasi
- 52) Dukungan operasional program imunisasi
- 53) Peningkatan Pengetahuan petugas tentang tanggap KLB
- 54) Pertemuan Pengelola Program Kesehatan Haji
- 55) Bimtek program Kesehatan Haji
- 56) Peningkatan pengetahuan petugas tentang EVSM & DQS
- 57) Pertemuan Jejaring Surveilans Epidemiologi
- 58) Monev program sepimkesma
- 59) Pemantauan dan Evaluasi Imunisasi rutin
- 60) Pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan KIPI
- 61) Pertemuan terpadu pengelola surveilans
- 62) Pertemuan evaluasi pelaksanaan kesehatan haji
- 63) Legalisasi ICV Jemaah haji
- 64) Pemantauan K3JH

5.1.5. Program Pengembangan lingkungan sehat

- 1) Monitoring dan evaluasi pelaporan
- 2) Sosialisasi dan advokasi dampak perubahan iklim
- 3) Pelatihan survailans Kualitas air dan penyehatan lingk.
- 4) Pelatihan STBM
- 5) Penilaian Pembinaan Dlm rangka Lomba desa
- 6) Pengadaan Penyaringan/Penyulingan air
- 7) Orientasi promosi higiene sanitasi
- 8) Pelatihan petugas studi EHRA
- 9) Pertemuan koordinasi dalam rangka evaluasi perencanaan kegiatan
- 10) Dalam Rangka Mengikuti Penyusunan rencana Kerja dan Anggaran yang dilaksanakan CPIU Pamsimas Pusat
- 11) Surveillance Kualitas Air Bersih Provinsi / Kabupaten / Puskesmas
- 12) Village CLTS Activitas Provinsi Kabupaten/Kota/Puskesmas
- 13) Implementing Village Facilitation Proses pemicuan di Desa. Provinsi, Kabupaten/Kota/Puskesmas
- 14) Monitoring Village For Sanitarian (Monitoring di Desa Program Pamsimas bg petugas sanitasi Provinsi, Kabupaten/Kota/Puskesmas
- 15) Awwareness For School communities Provinsi, Kabupaten/Kota/Puskesmas
- 16) Monitoring and Evaluation of Villlage Implementation Provinsi, Kabupaten/Kota/Puskesmas
- 17) Promotion Hygiene and Sanitation Provinsi, Kabupaten/Kota/Puskesmas
- 18) Monitoring for Hygiene Behaviour Change and sanitation access Provinsi, Kabupaten/Kota/Puskesmas

- 19) Advocacy and workshop at district level for Marketing approach
- 20) Pelatihan Klinik Sanitasi bagi tenaga Sanitarian se Provinsi Sulawesi Barat
- 21) Pengadaan kendaraan operasional Program Penyehatan Lingkungan dan Sanitasi
- 22) Pengawasan pembinaan tempat-tempat umum (TTU)
- 23) Sosialisasi dan Advokasi Penanganan Limbah Medis, Udara dan Radiasi
- 24) Pengadaan alat pengolah Data
- 25) Pengadaan Water Test Kit
- 26) Pendampingan Pemicuan STBM
- 27) Orientasi Promosi Hygiene dan Sanitasi (PHBS) di Masyarakat dan Sekolah
- 28) Replikasi desa pamsimas
- 29) Orientasi Promosi Hygiene & Sanitasi (PHBS) di Sekolah dan Masyarakat

5.1.6. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

- 1) Pelatihan PPGD
- 2) Pelatihan tim PONEC Puskesmas
- 3) Layanan Kesehatan Terpadu (DTPK)*
- 4) Pertemuan konsultasi Perencanaan Program Bina Upaya Kesehatan
- 5) Sosialisasi Jaminan Mutu puskesmas
- 6) Pelatihan tenaga pengelola Bank darah
- 7) Sosialisasi dan advokasi pelayanan dasar di DTPK
- 8) Monev pelayanan kedokteran dan kedokteran gigi keluarga
- 9) Peningkatan pemberdayaan masyarakat di DTPK di bidang kesehatan
- 10) Pertemuan koordinasi dinkes provinsi dan kabupaten dalam penyelenggaraan kesehatan dasar di PKM

- 11) Pelatihan manajemen mutu Puskesmas
- 12) Sosialisasi Akreditasi PKM
- 13) Bimbingan Akreditasi PKM
- 14) Sosialisasi standar Pelayanan gigi minimal di PKM
- 15) Pelatihan sistem Informasi kesehatan puskesmas
- 16) Peningkatan kemampuan petugas kesehatan puskesmas di DTPK
- 17) Monitoring dan evaluasi
- 18) Monitoring dan evaluasi perkembangan program kesehatan jiwa di RS
- 19) Peningkatan kapabilitas operator peralatan kesehatan dalam operasionalisasi dan pemeliharaan peralatan di RS/Puskesmas
- 20) Penguatan Pelaksanaan Pemantapan Mutu Pelayanan Laboratorium Kesehatan
- 21) Peningkatan Program PONEK di RS
- 22) Peningkatan Pelayanan Disaster Victim Identification di Rumah Sakit
- 23) Bimbingan dan Survey Akreditasi Rumah Sakit
- 24) Peningkatan Mutu dan Keselamatan pasien (Patient Safety)
- 25) Penerapan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)
- 26) Pelatihan ATLS / GELS
- 27) Pelatihan Klinis Petugas Kesehatan di Sarana Pelayanan Kesehatan
- 28) Pelatihan Tim Assesor Keperawatan di RS
- 29) Pelatihan Tim Assesor Kebidanan di RS
- 30) Lokakarya Penyusunan Standar Pelayanan Minimal RS
- 31) Sosialisasi Standar Pelayanan Kedokteran
- 32) Workshop Orientasi BLUD

- 33) Workshop Audit Medis (Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit)
- 34) Workshop Total Quality Management Rumah Sakit
- 35) Sosialisasi Standarisasi Sarana dan Peralatan Rumah Sakit
- 36) Pemutakhiran Data Sarana, Prasarana dan Peralatan RS dan Puskesmas
- 37) Pengelolaan Data Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan melalui Sistem
ASPAK
- 38) Peningkatan Kapabilitas Pengelola Rekam Medik di Rumah Sakit
- 39) Pelatihan Sistem informasi Rumah Sakit (SIRS)
- 40) Monitoring dan evaluasi Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan
- 41) Emergency Nursing Intermediete Level
- 42) Manajemen Keperawatan di RS
- 43) Pelatihan Penerapan Standar dan Pedoman Asuhan Kebidanan dengan
Pendekatan Sayang Ibu dan Sayang Bayi di RS
- 44) Review Hasil Penerapan Standar dan Pedoman Asuhan Kebidanan dengan
Pendekatan Sayang Ibu dan Sayang Bayi di RS
- 45) Sosialisasi Standar Pelayanan Keperawatan di RS
- 46) Peningkatan Kemampuan Teknis dalam Pelayanan Keterampilan Fisik di RSU
- 47) Peningkatan Proses Rujukan Kesehatan Jiwa (Peningkatan Keterampilan
Dokter dan Perawat RSU)
- 48) Workshop Sistem Rujukan Kesehatan Jiwa
- 49) Emergency Nursing Advance Level
- 50) Refresh Emergency Nursing Intermediete Level
- 51) Pelatihan Manajemen Ruang Perawatan
- 52) On The Job Training ICU bagi Perawat

5.1.7. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

- 1) Workshop Revitalisasi Keperawatan Kesehatan
- 2) Revitalisasi / Penerapan Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat
- 3) Pelatihan Penerapan Standar dan Pedoman Asuhan Kebidanan dengan Pendekatan Sayang Ibu dan Sayang Bayi di Puskesmas Perawatan
- 4) TOT Asuhan Kebidanan di PKM
- 5) Review Hasil Penerapan Asuhan Kebidanan dengan Pendekatan Sayang Ibu dan Sayang Bayi
- 6) Pelatihan Perawat Penyelia dan Perawat Koordinator Perkesmas
- 7) Pelatihan Perawat Pelaksana Perkesmas di PKM
- 8) Rapat Konsolidasi Perkesmas
- 9) Pembinaan Penerapan Perkesmas
- 10) Penerapan Asuhan Keperawatan di PKM
- 11) Emergency Nursing Basic Level
- 12) Peningkatan Peran dan Fungsi Perkesmas di PKM Terpencil
- 13) Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Perkesmas
- 14) Review Hasil Penerapan Perkesmas di PKM
- 15) TOT Manajemen Keperawatan di PKM
- 16) Monitoring dan Evaluasi Kesehatan Jiwa di PKM
- 17) Sosialisasi Bebas Pasung Lintas Sektor
- 18) Regulasi Bebas Pasung
- 19) Pengembangan Puskesmas Santun Lansia

5.1.8. Program Pelayanan Kesehatan Perorangan

- 1) Pembangunan Gedung UPTD Darah

- 2) Pengadaan sarana dan prasarana UPRD darah
- 3) Pembangunan Gedung UPTD Labkes
- 4) Pengadaan Sarana dan Prasaranan UPTD Labkes
- 5) Pembangunan gedung KKP
- 6) Pembangunan gedung Balai POM
- 7) Pembangunan gedung Pusditnakes

5.1.9. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

- 1) Monitoring Farmasi Komunitas dan Klinik di rumah Sakit
- 2) Pertemuan Penggunaan Obat Anti biotika yang Rasional
- 3) Pertemuan peningkatan Pengguna Obat Rasional melalui swamedikasi bagi kader kesehatan
- 4) Monitoring ketersediaan obat Indikator UKP4 di kabupaten
- 5) Pertemuan Perizinan Obat Tradisional dan Alkes
- 6) Pertemuan Evaluasi Program Pelayanan Kefarmasian dan alkes
- 7) Pemantauan dan Penulisan Penggunaan Obat Generik dan Obat di Puskesmas
- 8) Pemantauan dan Penulisan Penggunaan Obat Generik dan Obat di Rumah Sakit
- 9) Pertemuan Informasi Bahan Tambahan Makanan
- 10) Inventarisasi tanaman obat tradisional
- 11) Monev pemanfaatan alkes di sarana pelayanan kesehatan
- 12) Monev obat tradisional di sarana distribusi dan pengobat tradisional
- 13) Monev pembinaan sarana distribusi dan PAK (Penyalur Alat Kesehatan)
- 14) Pembinaan sarana produksi PKRT (Perbekalan Kesehatan rumah Tunggu)
- 15) Sampling Alkes dan PKRT

- 16) Pembinaan sarana distribusi Alkes dan PKRT
- 17) Sosialisasi peraturan di bidang produksi Obat, Obat tradisional kosmetik / makanan
- 18) Pelatihan sampling Alkes dan PKRT bagi petugas Provinsi dan kabupaten
- 19) Penyediaan Obat Buffer Stock di Instalasi Farmasi
- 20) Penyediaan dana stok opname obat buffer stock di IFP
- 21) Monev penggunaan obat tepat sasaran di IFK dan PKM
- 22) Pelatihan manajemen kefarmasian di instalasi farmasi
- 23) Rehabilitasi perbaikan gedung kantor IFP
- 24) Monitoring dan pengawasan obat narkotik dan psikotropik di IFK 5 Kabupaten
- 25) Perencanaan obat terpadu (POT) Instalasi Farmasi Provinsi
- 26) Penyediaan bahan operasional di IFP
- 27) Monev ketercukupan obat instalasi farmasi kabupaten di IFK dan Puskesmas

5.1.10. Program Pengawasan obat dan Makanan

- 1) Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
- 2) Pengawasan, pembinaan dan pengujian jajanan anak sekolah (FGD)

5.1.11. Program Kebijakan dan Management Pembangunan Kesehatan

1. Penyusunan Perencanaan Kinerja dan Keuangan
2. Rapat Evaluasi Program MDG'S Bidang Kesehatan
3. Penyusunan Buku Laporan Tahunan MDG'S
4. Rapat Koordinasi Tindak lanjut Atas Laporan Hasil Pemeriksaan
5. Monitoring dan Evaluasi Laporan Keuangan Atas Aset Negara

6. Fasilitasi Penanggulangan Daerah Bermasalah Kesehatan
7. Koordinasi Lintas Program dan Lintas Sektor Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
8. Peningkatan kapasitas SDM perencana provinsi dan kabupaten
9. Pertemuan penyusunan perencanaan tingkat Provinsi
10. Rapat koordinasi Se-Provinsi Sulawesi Barat
11. Rapat Koordinasi Pusat dan daerah (Bimwil)
12. Rapat kerja Kesehatan nasional
13. Rapat konsultasi DAK
14. Bimbingan teknis Perencanaan kabupaten
15. Pertemuan evaluasi pelaporan tingkat provinsi
16. Monitoring dan evaluasi ke kabupaten
17. Penyusunan laporan keuangan semesteran
18. Penyusunan laporan akhir tahun
19. Penyusunan Renstra SKPD
20. Penyusunan RKa SKPD
21. Penyusunan DKA SKPD
22. Penyusunan laporan keterangan pertanggung jawaban SKPD
23. Penyusunan Petunjuk teknis satker
24. Penyusunan RKAKL
25. Penyusunan evaluasi kinerja PP39
26. Penyusunan Profil Anggaran
27. Evaluasi pelayanan Publik bidang kesehatan
28. Kalakarya kesehatan

29. Pelatihan perencana Puskesmas dan kabupaten
30. Workshop peningkatan SDM pengelolaan keuangan

5.1.12. Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya

Manusia Kesehatan

- 1) Pembekalam tenaga kesehatan
- 2) Penilaian bagi tenaga kesehatan teladan
- 3) Pelatihan petugas pemeriksa kesehatan jamaah haji
- 4) Bantuan operasional Bea siswa
- 5) Pengumpula data SDM
- 6) Pemutakhiran data SDM tingkat provinsi
- 7) Faslitasi data SDM kesehatan
- 8) Pertemuan perencanaan kebutuhan SDM kab/Kota
- 9) Operasional MTKP
- 10) Pengelolaan nakes PTT

5.1.13. Program Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan

- 1) Pengembangan Sistem Informasi kesehatan (SIK)
- 2) Pelatihan Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) Generik
- 3) Monitoring dan evaluasi Standar pelayanan minimal bidang kesehatan
- 4) Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan
- 5) Pengumpula data kesehatan tingkat kabupaten
- 6) Penyusunan profil kesehatan tingkat kabupaten
- 7) Penyusunan profil kesehatan tingkat provinsi
- 8) Pertemuan pemutakhiran data tingkat provinsi

- 9) Operasional SIKDA
- 10) Pelatihan Penyusunan Profil kesehatan
- 11) Peningkatan kompetensi SDM bidang IT
- 12) Cross Check data kesehatan
- 13) Penyusunan Peta Informasi Rawan Gizi
- 14) Workshop analisis riskesdas
- 15) Workshop analisis riset faskes
- 16) Analisis data Puskesmas
- 17) Diseminasi data Kesehatan
- 18) Operasional Desa Sehat Bangun Mandar

5.1.14. Program Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan

- 1) Rapat koordinasi pembiayaan Jaminan Kesehatan
- 2) Rapat evaluasi Pembiayaan kesehatan
- 3) Penyusunan Perencanaan Terintegrasi Jaminan Kesehatan Tahunan Tingkat Provinsi
- 4) Koordinasi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Tingkat Provinsi
- 5) Sosialisasi Dukungan Kebijakan, Pedoman dan Prosedur Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
- 6) Advokasi Dalam Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan
- 7) Kerjasama LS/LP Dalam Kemitraan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan
- 8) Peningkatan Kapasitas Pengelola Program Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
- 9) Sinkronisasi Ketersediaan Data Sasaran Pelaksanaan Jaminan Kesehatan di Yankes Prioritas

- 10) Fasilitasi Ketersediaan Data Sasaran Pelaksanaan Jaminan Kesehatan di Yankes Prioritas
- 11) Sinkronisasi Perumusan dan Perhitungan Kebutuhan Biaya Pelayanan Prioritas yang Dikembangkan
- 12) Fasilitasi Perumusan dan Perhitungan Kebutuhan Biaya Pelayanan Prioritas yang Dikembangkan
- 13) Bimbingan Teknis Pelaksanaan Program Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Tingkat Provinsi
- 14) Pengawasan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
- 15) Konsultasi Teknis Pelaksanaan Program Pembiayaan dan Jamainan Kesehatan
- 16) Sosialisasi Petunjuk Teknis dan Kebijakan Pendukung Jaminan Kesehatan Masyarakat
- 17) Fasilitasi Petunjuk Teknis dan Manajemen Pelaksanaan Jaminan kesehatan Masyarakat
- 18) Koordinasi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Tingkat Provinsi dan Kabupaten
- 19) Pelatihan PHA Tingkat Provinsi
- 20) Pengumpulan Data PHA Tingkat Provinsi
- 21) Fasilitasi dan Penyediaan PHA Tingkat Provinsi
- 22) Pelatihan DHA Tingkat Kabuapten
- 23) Pengumpulan Data DHA Tingkat Provinsi
- 24) Bimbingan Teknis DHA
- 25) Konsultasi Teknis Pelaksanaan Program Jamainan Kesehatan Masyarakat

- 26) Profil Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Tingkat Provinsi
- 27) Pengawasan & Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Masyarakat
- 28) Pengawasan & Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Lanjutan Jaminan Kesehatan Masyarakat
- 29) Pengawasan & Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Persalinan
- 30) Pengawasan & Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Lanjutan Jaminan Persalinan
- 31) Pengamanan Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Tingkat Provinsi
- 32) Pengamanan Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Tingkat Kabupaten
- 33) Bimbingan Teknis Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Tingkat Kabupaten
- 34) Sosialisasi Dukungan Kebijakan, Pedoman dan Prosedur Bantuan Operasional Kesehatan
- 35) Koordinasi Pelaksanaan Bantuan Operasional Kesehatan Tingkat Provinsi
- 36) Kerjasama LS/LP Dalam Kemitraan Penyelenggaraan Bantuan Operasional Kesehatan
- 37) Pengawasan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Kesehatan
- 38) Supervisi Pelaksanaan Lokakarya Mini Tingkat Puskesmas
- 39) Konsultasi Teknis Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Kesehatan
- 40) Fasilitasi Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan

41) Profil Pelaksanaan Bantuan Operasional Kesehatan Tingkat Provinsi

5.1.15. Program Kesehatan Kerja dan Kesehatan Tradisional

- 1) Pelatihan kesehatan kerja bagi petugas kesehatan
- 2) Pendataan upaya kesehatan kerja
- 3) Pembinaan teknis, Monitoring dan Evaluasi (Provinsi, Kabupaten, Klinik Perusahaan, POS UKK)
- 4) Pertemuan forum komunikasi, sosialisasi dan advokasi kesehatan kerja, perkotaan dan olahraga tingkat provinsi
- 5) Pertemuan forum komunikasi, sosialisasi dan advokasi kesehatan kerja, perkotaan dan olahraga tingkat kabupaten
- 6) Pertemuan koordinasi LS/LP kesehatan kerja, perkotaan dan olahraga tingkat provinsi
- 7) Pelatihan petugas penyelenggara POS Usaha Kesehatan Kerja tingkat provinsi
- 8) Pelatihan kader POS UKK tingkat Kabupaten
- 9) Pendataan upaya kesehatan kerja
- 10) Sosialisasi sarana kesehatan (RS, Laboratorium, Gudang Farmasi, Dinas Kesehatan) Pemerintah dalam penerapan kesehatan kerja
- 11) Pelatihan petugas dalam penerapan kesehatan kerja di RS, Laboratorium, Gudang Farmasi dan Dinas Kesehatan tingkat provinsi
- 12) Sosialisasi pelaksanaan pengendalian faktor resiko dan pelayanan kesehatan penyelaman
- 13) Pelatihan petugas dalam pengendalian faktor resiko dan pelayanan kesehatan penyelaman
- 14) Pendataan KKP dalam usaha penerapan kesehatan penerbangan

- 15) Fasilitasi penerapan kesehatan penerbangan di KKP Tampa Padang
- 16) Pendataan lokasi khusus dan pengungsi tingkat provinsi
- 17) Pertemuan koordinasi penerapan lokasi khusus dan pengungsi tingkat provinsi

BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS KESEHATAN

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi dan merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari RPJMD. Secara rinci, penetapan indikator kinerja program pembangunan Dinas Kesehatan Provinsi Tahun 2012–2016 sebagai berikut

Tabel 6.7
Indikator kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
				2012	2013	2014	2015	2016	Kondisi akhir periode Renstra SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Menurunkan Angka kematian Ibu dari 185/100.000 kelahiran menjadi 102/100.000 kelahiran hidup pada tahun 2016	Menurunnya Angka Kematian Ibu menurun hingga 50% pada tahun 2016	Menurunnya Angka Kematian Ibu	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	60	63	65	67	70	70

			Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	77,4	79,6	81,8	84	86,2	86,2
			Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal (Cakupan K4)	67,15	65,83	69,91	74,09	78,3	78,3
Terselenggaranya Standarisasi dan peningkatan Mutu pelayanan Kesehatan Dasar dan rujukan	Meningkatnya Persentase Puskesmas dan Rumah Sakit Provinsi/Kab terakreditasi	Rumah sakit terakreditasi	Persentase RS yang terakreditasi	35	50	60	60	60	60
		Rumah sakit menerapkan Standar pelayanan minimal Rumah Sakit	Persentase RS Provinsi/Kab yang menerapkan SPM-RS	35	50	75	75	75	75
		Puskesmas perawatan mampu Poned	Persentase Puskesmas Rawat Inap mampu PONED	36,8	40	44	48	52	52
Menurunkan Angka Kematian Bayi dari 13,2 /1000 kelahiran hidup pada tahun 2011 menjadi 10/1000 Kelahiran hidup pada tahun 2016	Menurunnya Angka kematian Bayi hingga 20% pada tahun 2016	Menurunnya Angka Kematian Bayi	Cakupan Kunjungan Neonatal Pertama (KN1)	70	75	80	85	90	90
			Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi	89	89,5	89,5	90	90	90

Menurunkan Angka Kematian Balita dari 14,2 /1000 kelahiran hidup pada tahun 2011 menjadi 10,3/1000 Kelahiran hidup pada tahun 2016	Menurunnya Angka kematian Balita hingga 27% pada tahun 2016	Menurunnya Angka Kematian Balita	Persentase Balita ditimbang berat badannya (D/S)	72,24	76,08	79,92	83,76	87,6	91,44
Menurunkan prevalensi Gizi buruk dari 20,5 pada tahun 2011 menjadi 15,4 pada tahun 2016	Prevalensi gizi buruk menurun hingga 25% pada tahun 2016	Prevalensi Gizi buruk menurun	Persentase Balita ditimbang berat badannya (D/S)	72,24	76,08	79,92	83,76	87,6	87,6
			Persentase Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan	100	100	100	100	100	100
Meningkatnya Pelaksanaan Pemberdayaan dan Promosi Kesehatan Kepada Masyarakat	Meningkatnya Perilaku hidup bersih dan Sehat (PHBS) pada tingkatRumah Tangga	Perilaku Hidup Bersih dan Sehat meningkat menjadi 80 pada tahun 2016	Persentase RT ber -PHBS	62	67	71	75	80	80
		70% Persentase Desa Siaga Aktif pada tahun 2016	Persentase Desa Siaga Aktif	48	60	65	68	70	70
		35% Sekolah Dasar mempromosikan Kesehatan pada tahun 2016	Persentase Sekolah Dasar yang mempromosikan Kesehatan	10	15	20	30	35	35

Mencegah, menurunkan dan mengendalikan penyakit menular dan tidak menular serta masalah kesehatan lainnya.	Angka penemuan Kasus Malaria per 1000 penduduk sebesar 1 pada tahun 2016	Angka penemuan kasus malaria berkurang	Angka penemuan Kasus Malaria per 1000 penduduk	2,5	2	2	1,5	1,5	1,5
	Persentase kasus baru TB Paru (BTA Positif) yang ditemukan	Kasus TB Paru (BTA +) ditemukan berkurang	Persentase kasus baru TB Paru (BTA Positif) yang ditemukan	72	73	75	75	75	75
	Persentase desa yang mencapai UCI	Persentase Desa UCI mencapai 100 persen pada tahun 2016	Persentase desa UCI meningkat	90	95	100	100	100	100
	Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas mencapai 82% pada tahun 2016	Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas meningkat tiap tahunnya	Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas	63	65	70	75	80	82
	Persentase Kabupaten melaksanakan Pembinaan Kesehatan Kerja dan pengobatan alternatif mencapai 100% pada tahun 2016	Persentase kabupaten melaksanakan pembinaan kesehatan kerja dan obat tradisional	Persentase kabupaten melaksanakan pembinaan kesehatan kerja dan obat tradisional	0	60	100	100	100	100
Meningkatnya sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar dan terjangkau oleh masyarakat.	Meningkatnya ketersediaan obat dan vaksin sebesar 100%	Tersedianya obat dan vaksin disarana kesehatan	Persentase Ketersediaan Obat dan vaksin	80	80	100	100	100	100

Meningkatnya kualitas manajemen dan perencanaan bidang kesehatan	100% dokumen perencanaan dan anggaran tersusun sesuai standar	Dokumen perencanaan dan anggaran tersusun sesuai standar	Dokumen perencanaan dan anggaran tersusun sesuai standar	100	100	100	100	100	100
	100% Provinsi dan kabupaten dengan daerah bermasalah Kesehatan (DBK) mendapat fasilitasi Penanggulangan DBK	Kabupaten DBK mendapatkan fasilitasi penanggulangan DBK	Persentase kabupaten dengan daerah bermasalah Kesehatan (DBK) mendapat fasilitasi Penanggulangan DBK	75	75	100	100	100	100
	100% Kabupaten melaksanakan Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin	Kabupaten yang melaksanakan Jaminan Pelayanan Kesehatan Daerah	Persentase Kabupaten melaksanakan Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat miskin	-	80	80	83	100	100
	100% Provinsi dan Kabupaten menyusun PHA dan DHA setiap tahun	Provinsi dan Kabupaten menyusun PHA dan DHA	Persentase provinsi dan kabupaten menyusun PHA dan DHA setiap tahunnya	-	17	17	67	83	83
Meningkatnya kualitas Sumber daya kesehatan	100 % tenaga kesehatan yang lulus uji kompetensi berizin	Tenaga kesehatan yang lulus uji kompetensi berizin	Teregistrasinya tenaga kesehatan	50	55	60	65	70	75
Tersusunnya data dan Informasi Kesehatan yang akurat, akuntabel, lengkap dan tepat waktu	100% Kabupaten dan provinsi menyusun Profil Kesehatan dan memiliki Sistem Informasi Kesehatan	Kabupaten dan Provinsi menyusun Profil kesehatan tiap tahun dan memiliki bank data kesehatan	100 % Kab memiliki profil kesehatan menurut Jenis Kelamin	100%	100%	100%	100%	100%	100%

LAMPIRAN

ALOKASI KEBUTUHAN RENCANA STRATEGIS

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Program	Kode				Program dan Kegiatan	2012	2013	2014	2015	2016
			1	02	01	32		9	11	13	15	17
Menurunkan Angka Kematian Ibu dari 185/100.000 kelahiran menjadi 102/100.000 kelahiran hidup pada tahun 2016	Angka Kematian Ibu menurun hingga 50% pada tahun 2016	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani					5,621,372,000	5,902,440,600	6,197,562,630	6,507,440,762	6,832,812,800	
						Perawatan berkala bagi ibu hamil dan WUS dari keluarga kurang mampu	153,275,000	160,938,750	168,985,688	177,434,972	186,306,720	
						Program Perencanaan Persalinan dan Penanganan Komplikasi (P4K)	51,736,000	56,909,600	62,600,560	68,860,616	75,746,678	
						advokasi dan pembentukan rumah tunggu bagi ibu hamil risti dan seluruh ibu hamil di daerah geografis sulit tanpa fasilitas kesehatan di kabupaten	48,325,000	53,157,500	58,473,250	64,320,575	70,752,633	
						Peningkatan Kemampuan Petugas Dalam Asuhan Persalinan Normal	287,165,000	315,881,500	347,469,650	382,216,615	420,438,277	
						Evaluasi pasca latih	23,100,000	25,410,000	27,951,000	30,746,100	33,820,710	
						orientasi dan peningkatan pelaksanaan kemitraan bidan dan dukun	52,011,000	57,212,100	62,933,310	69,226,641	76,149,305	
						Supervisi Pembinaan Tekhnis Pasca Pelitihan	23,100,000	25,410,000	27,951,000	30,746,100	33,820,710	
						Orientasi Peningkatan kemampuan petugas dalam penanganan kegawatdaruratan kebidanan oleh SpOG	84,200,000	92,620,000	101,882,000	112,070,200	123,277,220	
						Orientasi Peningkatan kemampuan petugas pelaksanaan ANC Terpadu	52,765,000	58,041,500	63,845,650	70,230,215	77,253,237	
						Orinetasi Kelas Ibu Hamil	48,435,000	53,278,500	58,606,350	64,466,985	70,913,684	
		Persentase cakupan Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal (K4)				Orientasi Kelas Ibu Hamil	250,000,000	-	-	-	-	
						pembinaan PKM dlm pelaksanaan pemantauan wilayah setempat (PWS) termasuk layanan swasta	54,173,000	59,590,300	65,549,330	72,104,263	79,314,689	
						Monitoring dan Evaluasi Program KIA	75,760,000	83,336,000	91,669,600	100,836,560	110,920,216	
						RR KB	55,830,000	-	66,996,000	73,695,600	0	
						Peningkatan Kemampuan Petugas Dalam penggunaan ABPK	-	55,756,000	-	66,907,200	0	
						Peningkatan Kemampuan Petugas Dalam Manajemen KB	0	55,756,000	61,331,600	0	0	
						orientasi bikor dlm melaksanakan supervisi fasilitatif	48,435,000	0	0	62,965,500	0	
Terselenggaranya Standarisasi dan peningkatan Mutu pelayanan Kesehatan Dasar dan rujukan	Persentase Puskesmas Rawat inap mampu poned menjadi 52% pada tahun 2016	Persentase Puskesmas rawat Inap mampu PONED				Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	2,445,814,000	7,136,624,950	7,466,066,948	7,655,006,282	6,447,347,608	
						Pelatihan PPGD	625,980,000.00	650,000,000	682,500,000		-	

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Program	Kode	Program dan Kegiatan	2012	2013	2014	2015	2016
				Pelatihan Tim PONEK Puskesmas	449,410,000.00	395,000,000	425,000,000		
				Layanan Kesehatan Daerah Terpencil Perbatasan Kepulauan (DTPK)	60,000,000.00	150,000,000	225,000,000	350,000,000	400,000,000
				Pertemuan Konsultasi Perencanaan Program Bina Upaya Kesehatan					
				Sosialisasi Jaminan mutu puskesmas	65,000,000.00	95,000,000			
				Pelatihan Tenaga pengelola bank darah		200,000,000	225,000,000	250,000,000	
				Sosialisasi & advokasi Pelayanan dasar di DTPK		115,000,000			
				Monev Pelayanan kedokteran & Kedokteran gigi keluarga	30,000,000.00	45,000,000	50,000,000	65,000,000	70,000,000
				Peningkatan pemberdayaan masyarakat DTPK di bdg kesehatan		250,000,000	270,000,000	285,000,000	300,000,000
				Pertemuan koordinasi Dinkes Provinsi & kab dlm penyelenggaraan kesehatan dasar di PKM		100,000,000	115,000,000	120,000,000	125,000,000
				Pelatihan manajemen Mutu Puskesmas		250,000,000	275,000,000	300,000,000	315,000,000
				Sosialisasi Akreditasi PKM		80,000,000	95,000,000		
				Bimbingan akreditasi PKM					125,000,000
				Sosialisasi Standar Pelayanan Gigi Minimal di PKM		70,000,000	125,000,000		
				Pelatihan Sistem Informasi kesehatan Puskesmas		150,000,000	175,000,000	200,000,000	
				Peningkatan Kemampuan Petugas Kesehatan Puskesmas di DTPK	100,205,000.00	125,000,000	150,000,000	175,000,000	225,000,000
				Monitoring dan Evaluasi					
				Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Program Kesehatan Jiwa di RS		75,000,000	78,750,000	82,687,500	86,821,875
				Peningkatan Kapabilitas Operator Peralatan Kesehatan dalam Operasionalisasi dan Pemeliharaan Peralatan di RS/Puskesmas	112,370,000.00	117,988,500	123,887,925	130,082,321	136,586,437
				Penguatan Pelaksanaan Pemantapan Mutu Pelayanan Laboratorium Kesehatan		150,000,000	157,500,000	165,375,000	173,643,750
				Peningkatan Kapabilitas Petugas Listrik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		130,000,000	136,500,000	143,325,000	150,491,250
	Persentase Rumah Sakit PrPersentase RS Provinsi/Kab terakreditasi	Persentase RS yang terakreditasi							
				Peningkatan Program PONEK di RS	119,160,000.00	125,118,000	131,373,900	137,942,595	144,839,725
				Peningkatan Pelayanan Disaster Victim Identification di Rumah Sakit		210,000,000	220,500,000	231,525,000	243,101,250
				Bimbingan dan Survey Akreditasi Rumah Sakit	100,936,000.00	105,982,800	111,281,940	116,846,037	122,688,339
				Peningkatan Mutu dan Keselamatan pasien (Patient Safety)		163,950,000	172,147,500	180,754,875	189,792,619
				Penerapan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)		175,000,000	183,750,000	192,937,500	202,584,375
				Pelatihan ATLS / GELS		455,780,000		501,358,000	
				Pelatihan Klinis Petugas Kesehatan di Sarana Pelayanan Kesehatan	116,775,000.00	122,613,750	128,744,438	135,181,659	141,940,742
				Pelatihan Tim Assesor Keperawatan di RS		150,000,000	157,500,000	165,375,000	
				Pelatihan Tim Assesor Kebidanan di RS		150,000,000	157,500,000	165,375,000	
	Persentase Rumah Sakit Provinsi / Kab yang menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit	Persentase RS Provinsi/Kab yang menerapkan SPM-RS							
				Lokakarya Penyusunan Standar Pelayanan Minimal RS	108,775,000.00	114,213,750	119,924,438	125,920,659	132,216,692
				Sosialisasi Standar Pelayanan Kedokteran		150,000,000	157,500,000	165,375,000	173,643,750
				Workshop Orientasi BLUD		130,000,000	136,500,000	143,325,000	150,491,250
				Workshop Audit Medis (Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit)		150,000,000	157,500,000	165,375,000	173,643,750
				Workshop Total Quality Management Rumah Sakit		150,000,000	157,500,000	165,375,000	173,643,750
				Sosialisasi Standarisasi Sarana dan Peralatan Rumah Sakit	71,339,000.00	74,905,950	78,651,248	82,583,810	86,713,000
				Pemutakhiran Data Sarana, Prasarana dan Peralatan RS dan Puskesmas		125,000,000	131,250,000	137,812,500	144,703,125
				Pengelolaan Data Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan melalui Sistem ASPAK		125,000,000	131,250,000	137,812,500	144,703,125

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Program	Kode	Program dan Kegiatan					
					2012	2013	2014	2015	2016
				Peningkatan Kapabilitas Pengelola Rekam Medik di Rumah Sakit		125,000,000	131,250,000	137,812,500	144,703,125
				Pelatihan Sistem informasi Rumah Sakit (SIRS)		130,000,000	136,500,000	143,325,000	150,491,250
				Monitoring dan evaluasi Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan	28,500,000.00	29,925,000	31,421,250	32,992,313	34,641,928
				Emergency Nursing Intermediete Level	324,359,000.00	340,576,950	357,605,798		
				Manajemen Keperawatan di RS		150,305,000		157,820,250	
				Pelatihan Penerapan Standar dan Pedoman Asuhan Kebidanan dengan Pendekatan Sayang Ibu dan Sayang Bayi di RS	133,005,000.00	139,655,250	146,638,013		
				Review Hasil Penerapan Standar dan Pedoman Asuhan Kebidanan dengan Pendekatan Sayang Ibu dan Sayang Bayi di RS				125,000,000	131,250,000
				Sosialisasi Standar Pelayanan Keperawatan di RS		95,000,000		99,750,000	
				Peningkatan Kemampuan Teknis dalam Pelayanan Keterampilan Fisik di RSU		150,305,000	157,820,250		
				Peningkatan Proses Rujukan Kesehatan Jiwa (Peningkatan Keterampilan Dokter dan Perawat RSU)		150,305,000	157,820,250	165,711,263	
				Workshop Sistem Rujukan Kesehatan Jiwa				160,000,000	168,000,000
				Emergency Nursing Advance Level				350,000,000	367,500,000
				Refresh Emergency Nursing Intermediete Level				325,000,000	341,250,000
				Pelatihan Manajemen Ruangan Perawatan			145,000,000	152,250,000	159,862,500
				On The Job Training ICU bagi Perawat			560,000,000	588,000,000	617,400,000
				Program Upaya Kesehatan Masyarakat	262,380,000	1,782,723,000	2,122,799,150	2,758,577,200	2,535,891,266
				Workshop Revitalisasi Keperawatan Kesehatan	98,110,000.00				
				Revitalisasi / Penerapan Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat	98,860,000.00	-			
				Pelatihan Penerapan Standar dan Pedoman Asuhan Kebidanan dengan Pendekatan Sayang Ibu dan Sayang Bayi		228,260,000	239,673,000	251,656,650	
				TOT Asuhan Kebidanan di PKM				135,000,000	141,750,000
				Review Hasil Penerapan Asuhan Kebidanan dengan Pendekatan Sayang Ibu dan Sayang Bayi				125,000,000	131,250,000
				Pelatihan Perawat Penyelia dan Perawat Koordinator Perkesmas		140,039,000	147,040,950	140,039,000	
				Pelatihan Perawat Pelaksana Perkesmas di PKM		139,099,000	146,993,950	139,099,000	146,053,950
				Rapat Konsolidasi Perkesmas				150,000,000	157,500,000
				Pembinaan Penerapan Perkesmas				230,000,000	241,500,000
				Penerapan Asuhan Keperawatan di PKM		199,105,000	209,060,250		
				Emergency Nursing Basic Level		467,490,000	490,864,500	515,407,725	
				Peningkatan Peran dan Fungsi Perkesmas di PKM Terpencil		223,730,000	234,916,500	246,662,325	258,995,441
				Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Perkesmas		60,000,000	63,000,000	66,150,000	69,457,500
				Review Hasil Penerapan Perkesmas di PKM					125,000,000
				Refresh Emergency Nursing Basic Level					325,000,000
				Pelatihan Kader Kesehatan Jiwa di Posyandu/Poskesdes		125,000,000	131,250,000	137,812,500	
				TOT Kader Kesehatan Jiwa di Posyandu/Poskesdes				135,000,000	141,750,000

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Program	Kode				Program dan Kegiatan						
								2012	2013	2014	2015	2016	
							Manajemen Keperawatan di PKM		125,000,000	131,250,000	137,812,500		
							Review Manajemen Keperawatan di PKM					150,000,000	
							TOT Manajemen Keperawatan di PKM				135,000,000	141,750,000	
							Monitoring dan Evaluasi Kesehatan Jiwa di PKM		75,000,000	78,750,000	82,687,500	86,821,875	
							Sosialisasi Bebas Pasung Lintas Sektor	65,410,000.00		125,000,000		131,250,000	
							Regulasi Bebas Pasung					150,000,000	
							Pengembangan Puskesmas Santun Lansia			125,000,000	131,250,000	137,812,500	
							Program Pelayanan Kesehatan Perorangan	-	3,500,000,000.00	7,000,000,000.00	23,000,000,000.00	2,500,000,000.00	
							Pembangunan Gedung UPTD Darah			2,000,000,000	1,500,000,000		
							Pengadaan Sarana dan Prasarana UPTD Darah			1,500,000,000	1,000,000,000	2,000,000,000	
							Pembangunan Gedung UPTD Labkes		2,000,000,000	2,000,000,000	1,500,000,000		
							Pengadaan Sarana dan Prasarana UPTD Labkes		1,500,000,000	1,500,000,000	1,000,000,000	500,000,000	
							Pengembangan RS Provinsi Sulawesi Barat			6,500,000,000	9,000,000,000	12,000,000,000	
							Pembangunan Gedung KKP				3,000,000,000		
							Pembangunan Gedung Balai POM				3,000,000,000		
							Pembangunan Gedung Puskitnakes				3,000,000,000		
Menurunkan Angka Kematian Bayi dari 13,2 /1000 kelahiran hidup pada tahun 2011 menjadi 10/1000 Kelahiran hidup pada tahun 2016	Angka kematian Bayi menurun hingga 20% pada tahun 2016	Cakupan komplikasi neonatus yang ditangani	1	02	01	32	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak						
							Peningkatan Kemampuan Petugas Dalam Manajemen BBLR	103,930,000	114,323,000	125,755,300	138,330,830	152,163,913	
							Peningkatan Kemampuan Petugas Dalam Manajemen Asfiksia	98,710,000	108,581,000	119,439,100	131,383,010	144,521,311	
							Peningkatan Kemampuan Petugas Dalam Manajemen BBL	60,075,000	66,082,500	72,690,750	79,959,825	87,955,808	
							Peningkatan kemampuan tenaga kesehatan (Dokter, Bidan dan perawat dalam memberikan pelayanan neonatal)	55,595,000	61,154,500	67,269,950	73,996,945	81,396,640	
							Orientasi Peningkatan kemampuan petugas dalam penanganan kegawatdaruratan neonatal oleh SpA	84,200,000	92,620,000	101,882,000	112,070,200	123,277,220	
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi					Pelayanan Kesehatan Bayi Anak dan Balita dari keluarga kurang mampu	106,070,000	116,677,000	128,344,700	141,179,170	155,297,087	
Menurunkan Angka Kematian Balita dari 14,2 /1000 kelahiran hidup pada tahun 2011 menjadi 10,3/1000 Kelahiran hidup pada tahun 2016	Angka kematian Balita menurun hingga 27% pada tahun 2016	Cakupan pelayanan kesehatan anak balita					Supervisi Pembinaan Tekhnis Penurunan AKB dan AKABA terintergrasi	23,100,000	25,410,000	27,951,000	30,746,100	33,820,710	
							Pengadaan Buku Kohort Bayi dan Balita	0	55,000,000	0	155,000,000	0	
							Orientasi Kelas Ibu Balita	0	54,575,000	60,032,500	66,035,750	72,639,325	
							Pengadaan Paket Kelas Ibu Balita	0	200,000,000	0	0	0	

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Program	Kode			Program dan Kegiatan	2012	2013	2014	2015	2016	
						Peningkatan Kemampuan Petugas dalam pengisian Kohort bayi dan anak balita	74,510,000	-	81,961,000	-	90,157,100	
						Pertemuan koordinasi linyas provinsi dan kabupaten program Kesehatan Anak	0	63,570,000	69,927,000	76,919,700	84,611,670	
						Peningkatan Kemampuan Petugas Dalam Manajemen SDIDTK	46,720,000	51,392,000	56,531,200	62,184,320	68,402,752	
						Peningkatan Kemampuan Petugas Dalam MTBS / MTBM	84,200,000	92,620,000	101,882,000	112,070,200	123,277,220	
Menurunkan prevalensi Gizi buruk dari 20,5 pada tahun 2011 menjadi 15,4 pada tahun 2016	Prevalensi gizi buruk menurun hingga 25% pada tahun 2016	Persentase Balita ditimbang berat badannya (D/S)	02	01	32	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	1,932,318,500	3,456,597,500	3,254,694,500	3,346,582,000	3,407,285,000	
			1	02	01	Peningkatan Kapasitas Petugas dalam Penggunaan Standar Pemantauan Pertumbuhan Balita bagi TPG	212,950,000	208,320,000	258,320,000	333,320,000	433,320,000	
				02	01	20	Diseminasi cakupan D/S		73,520,000	123,520,000	148,520,000	223,520,000
				02	01	20	Pertemuan LP/LS dalam Rangka Peningkatan Cakupan Program Gizi	60,500,000		110,500,000	185,500,000	285,500,000
				02	01	20	Pengadaan KMS		150,000,000		250,000,000	
				02	01	20	pengadaan antropometri KIT (dacing, lengthboard,microtoice)		70,400,000			88,000,000
		Persentase Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan		02	01	20	Peningkatan Kapasitas Ptugas dalam tatalaksana gizi buruk untuk PKM perawatan	93,365,000	188,560,000	143,365,000		
				02	01	20	Peningkatan Kapasitas Ptugas dalam tatalaksana gizi buruk untuk PKM Non perawatan	108,179,500	133,179,500	158,179,500		
				02	01	20	Pelacakan dan Konfirmasi Gizi Buruk	33,500,000	33,500,000	43,500,000	58,500,000	78,500,000
				02	01	20	Pengadaan MP - ASI dan PMT pemulihan	400,000,000		600,000,000		
				02	01	20	Penyusunan Peta Informasi masyarakat kurang gizi		200,000,000		250,000,000	
				02	01	20	Peningkatan Kapasitas Petugas dalam Penggunaan Software Nutriclin		136,130,000	236,130,000		
				02	01	20	Pengadaan Kapsul Vitaamin A Biru dan Kapsul Vitamin A Merah		250,000,000		300,000,000	
							Peningkatan Kemampuan petugas dalam konseling menyusui	256,050,000	306,050,000	396,050,000	456,050,000	556,050,000
							Sosialisasi PP ASI		56,483,000			
							sosialisasi pencatatan dan perhitungan ASI Eksklusif sesuai buku Surveillance Gizi Tahun 2012		80,000,000			
							Pertemuan Manajemen Distribusi Gizi Mikro Tablet Fe		67,630,000		117,630,000	
							Pertemuan Terpadu GIZI KIA dalam Peningkatan Cakupan Fe		80,000,000		155,000,000	

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Program	Kode			Program dan Kegiatan					
							2012	2013	2014	2015	2016
						Sosialisasi Peningkatan Cakupan Konsumsi Garam Beryodium	60,333,000		110,333,000		210,333,000
						Sosialisasi Penanggulangan Masalah GAKY		64,030,000			
						Pemantauan Garam Beriodium		50,000,000	70,000,000	100,000,000	150,000,000
						pengadaan iodina test	35,600,000	8,000,000	13,000,000	15,000,000	25,000,000
						sosialisasi PP GAKY		56,483,000			
						Sosialisasi Gernas TK Kabupaten		437,515,000			
						Sosialisasi Gernas Sadar Gizi TK Provinsi	105,820,000	84,735,000	134,735,000		
						Kampanye Gernas sadar Gizi Melalui Media Elektronik	15,000,000	25,000,000	30,000,000		
						Pengadaan Madia Penyuluhan GERNAS	192,835,000	65,000,000	75,000,000		
						surveilans gizi tingkat Kabupaten	221,846,000	255,932,000	275,932,000	300,932,000	350,932,000
						sosialisasi Web. SIGIZI		80,000,000			
						Pelatihan Penggunaan Website Sigizi Provinsi, Kab. dan Puskesmas		80,000,000	160,000,000	210,000,000	340,000,000
						Peningkatan Kapasitas Manajemen TPG untuk pengelolaan Program Gizi di Puskesmas	75,200,000	150,400,000	200,400,000	275,400,000	375,400,000
						Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Surveillance Gizi	61,140,000				
						Pertemuan Surveillance Gizi dan Pelaporan Indikator Kinerja Gizi Berbasis Gizi Net		65,730,000	115,730,000	190,730,000	290,730,000
Meningkatnya Pelaksanaan Pemberdayaan dan Promosi Kesehatan Kepada Masyarakat	Meningkatnya Perilaku hidup bersih dan Sehat (PHBS) pada tingkat Rumah Tangga	Perilaku Hidup Bersih dan Sehat meningkat menjadi 70 pada tahun 2016	02	01	19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	9,822,770,000	15,156,999,000	18,056,038,700	23,801,026,570	25,960,129,227
						Pertemuan Koordinasi dengan LP/LS Peningkatan Promkes Bidang PHBS	79,995,000	87,994,500	96,793,950	106,473,345	117,120,680
						Pengembangan media rumah tangga ber PHBS	95,720,000	105,292,000	115,821,200	127,403,320	140,143,652
						Orientasi peningkatan peran serta organisasi/keompok masyarakat dalam mewujudkan PHBS	104,205,000	114,625,500	126,088,050	138,696,855	152,566,541
						TOT Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat ber PHBS	158,880,000	174,768,000	192,244,800	211,469,280	232,616,208
						Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat ber PHBS	232,960,000	256,256,000	281,881,600	310,069,760	341,076,736
						Penyebaran Informasi rumah tangga ber PHBS	40,080,000	44,088,000	48,496,800	53,346,480	58,681,128

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Program	Kode			Program dan Kegiatan					
							2012	2013	2014	2015	2016
						Peningkatan kemampuan petugas promosi kesehatan dalam meningkatkan cakupan rumah tangga ber PHBS		65,720,000	72,292,000	79,521,200	87,473,320
						Monitoring dan Evaluasi pencapaian rumah tangga ber PHBS	67,110,000	73,821,000	81,203,100	89,323,410	98,255,751
						Survey Rumah Tangga Sehat	-	175,000	192,500	211,750	232,925
		Persentase Desa Siaga Aktif				Pertemuan pembentukan Pokjanel Desa/Keluran Siaga tingkat Provinsi	75,250,000	-	-	-	-
						Pertemuan pembentukan Pokjanel Desa/Keluran Siaga tingkat kabupaten	140,500,000	-	-	-	-
						Pertemuan koordinasi Pokjanel Desa/Keluran Siaga tingkat Provinsi	89,625,000	98,587,500	108,446,250	119,290,875	131,219,963
						Pembinaan Desa Siaga Aktif tingkat Provinsi	138,445,000	152,289,500	167,518,450	184,270,295	202,697,325
		Persentase Sekolah Dasar yang mempromosikan kesehatan				Pertemuan Koordinasi dengan LP/LS Peningkatan Usaha Kesehatan Sekolah	-	85,000,000	93,500,000	102,850,000	113,135,000
						Fasilitasi Peningkatan Usaha Kesehatan Sekolah	-				
						Pelatihan Peer Edukator & Konseling P3 NAPZA	-	130,000,000	143,000,000	157,300,000	173,030,000
						Pelatihan Dokter Kecil	-	130,000,000	143,000,000	157,300,000	173,030,000
						Pelatihan Kader Kesehatan Remaja	-	130,000,000	143,000,000	157,300,000	173,030,000
						Lomba Sekolah Sehat tingkat Provinsi	-	140,000,000	154,000,000	169,400,000	186,340,000
						Sosialisasi perumusan dan pembuatan kebijakan teknis promosi kesehatan LP/LS tingkat Provinsi	-	90,000,000	99,000,000	108,900,000	119,790,000
						Fasilitasi penyusunan perumusan dan pembuatan kebijakan teknis promosi kesehatan	-	50,000,000	55,000,000	60,500,000	66,550,000
						Finalisasi dan penetapan kebijakan teknis promosi kesehatan	-	120,000,000	132,000,000	145,200,000	159,720,000
						Sosialisasi perumusan dan pembuatan kebijakan berwawasan kesehatan LP/LS tingkat Provinsi	-	90,000,000	99,000,000	108,900,000	119,790,000
						Fasilitasi penyusunan perumusan dan pembuatan kebijakan berwawasan kesehatan	-	50,000,000	55,000,000	60,500,000	66,550,000
						Finalisasi dan penetapan kebijakan berwawasan kesehatan	-	120,000,000	132,000,000	145,200,000	159,720,000

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Program	Kode				Program dan Kegiatan	2012	2013	2014	2015	2016
	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional/komple menter alternatif	Persentase Kabupaten yang menyelenggarakan pembinaan pelayanan kesehatan tradisional, alternatif dan komplementer	02	01	51		Program Kesehatan Kerja dan Kesehatan Tradisional		694,191,000	1,455,280,000	3,570,500,000	3,817,050,000
							Monev Pendataan Program Kesehatan Tradisional	-		134,220,000	135,000,000	140,000,000
		Cakupan Kab/Kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional, alternatif, dan komplementer					Pelatihan Pelatihan Selfcare Ramuan dan Pemanfaatan TOGA	-		314,040,000	320,000,000	320,000,000
							Pelatihan Akurpresur bagi tenaga kesehatan			314,340,000	320,000,000	330,000,000
							Rapat Lintas Program/Lintas Sektor kesehatan tradisional/komplementer dan alternatif tingkat provinsi	-			90,000,000	95,000,000
							Rapat Tim pengendali dan Tim Pelaksana Sentra P3T	-			90,000,000	95,000,000
		Jumlah metode pelayanan kesehatan tradisional/komplementer alternatif yang telah ditetapkan aman dan efektif untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan					Pembinaan dan Sosialisasi Peraturan Perundangan dalam Penyelenggaraan Praktek Pengobatan Tradisional bagi Pengobat Tradisional (Batra) di 6 Kab/Kota di Prov.Sulbar	-	95,000,000	-	230,000,000	240,000,000
							Monev integrasi terpadu Lintas Sektor (Dinas/Instansi terkait) dalam Pembinaan dan Pengawasan Upaya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer				110,000,000	130,000,000
							Paket Pelatihan Akupuntur Bagi Dokter di RSCM				120,000,000	140,000,000
							Seminar upaya peningkatan umur harapan hidup melalui gerakan "Back to Nature" dalam pengobatan ramuan tradisional dan alternatif berbasis bukti				150,000,000	160,000,000
							Penelitian Tanaman Obat	-			350,000,000	370,000,000
		Persentase Kab/Kota yang minimal mempunyai puskesmas/klinik yang telah melaksanakan upaya Kesehatan Kerja					Pembinaan teknis, Monitoring dan Evaluasi (Provinsi, Kabupaten, Klinik Perusahaan, POS UKK)	-		87,680,000	95,000,000	110,000,000
							Pelatihan Upaya Kesehatan Kerja bagi PKM dan klinik yang ada di Wilayah Industri/Perkantoran/Perusahaan				300,000,000	340,000,000
							Pendataan upaya kesehatan kerja	-	49,191,000	-	80,000,000	85,000,000
							Pelatihan bagi Nakes dalam Diagnosis Peanyakit Akibat Kerja (PAK)				320,000,000	325,000,000

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Program	Kode			Program dan Kegiatan					
							2012	2013	2014	2015	2016
						Bimtek dan Monitoring, Evaluasi dalam upaya penerapan Kesehatan Kerja di PKM Klinik yg di Wilayah Kerjanya terdnt Monev integrasi terpadu Lintas Sektor (Dinas/Instansi terkait) dalam Pembinaan dan Pengawasan Unava Kesehatan				95,000,000	95,000,000
										100,000,000	110,000,000
						Sosialisasi sarana kesehatan (RS, Laboratorium, Gudang Farmasi, Dinas Kesehatan) Pemerintah dalam penerapan kesehatan kerja	-	50,000,000	55,000,000	60,500,000	66,550,000
						Pelatihan petugas dalam penerapan kesehatan kerja di RS, Laboratorium, Gudang Farmasi dan Dinas Kesehatan tingkat provinsi	-	125,000,000	137,500,000	151,250,000	166,375,000
						Sosialisasi pelaksanaan pengendalian faktor resiko dan pelayanan kesehatan penyelaman	-	50,000,000	55,000,000	60,500,000	66,550,000
						Pelatihan petugas dalam pengendalian faktor resiko dan pelayanan kesehatan penyelaman	-	125,000,000	137,500,000	151,250,000	166,375,000
						Pendataan KKP dalam usaha penerapan kesehatan penerbangan	-	25,000,000	27,500,000	30,250,000	33,275,000
						Fasilitasi penerapan kesehatan penerbangan di KKP Tanpa Padang	-	50,000,000	55,000,000	60,500,000	66,550,000
						Pendataan lokasi khusus dan pengungsi tingkat provinsi	-	35,000,000	38,500,000	42,350,000	46,585,000
						Pertemuan koordinasi penerapan lokasi khusus dan pengungsi tingkat provinsi	-	90,000,000	99,000,000	108,900,000	119,790,000
						Puskesmas yang mendapatkan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	8,600,000,000	9,460,000,000	10,406,000,000	11,446,600,000	12,591,260,000
		100% Kabupaten melaksanakan Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin	02	01	52	Program Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan					
						Peremuan perumusan dan perencanaan pedoman BOK tingkat provinsi	-	50,000,000	55,000,000	60,500,000	66,550,000
						Fasilitasi penetapan pedoman BOK	-	65,000,000	71,500,000	78,650,000	86,515,000
						Penggandaan dan distribusi pedoman BOK	-	30,000,000	33,000,000	36,300,000	39,930,000
						Peremuan perumusan dan perencanaan instrumen BOK tingkat provinsi	-	50,000,000	55,000,000	60,500,000	66,550,000
						Fasilitasi penetapan instrumen BOK	-	65,000,000	71,500,000	78,650,000	86,515,000
						Penggandaan dan distribusi instrumen BOK	-	30,000,000	33,000,000	36,300,000	39,930,000
						Monitoring dan Evaluasi Program BOK	-	40,000,000	44,000,000	48,400,000	53,240,000
						Profil pelaksanaan BOK Provinsi Sulawesi Barat	-	25,000,000	27,500,000	30,250,000	33,275,000
						Sosialisasi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Umium (JPKMU) tingkat provinsi	-	60,000,000	66,000,000	72,600,000	79,860,000

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Program	Kode	Program dan Kegiatan					
					2012	2013	2014	2015	2016
				Pertemuan koordinasi pelaksanaan JPKMU tingkat provinsi dan kabupaten	-	90,000,000	99,000,000	108,900,000	119,790,000
		100% Provinsi dan Kabupaten menyusun PHA dan DHA setiap tahun		Pelatihan PHA tingkat provinsi	-	150,000,000	165,000,000	181,500,000	199,650,000
				Pengumpulan data PHA tingkat provinsi	-	100,000,000	110,000,000	121,000,000	133,100,000
				Fasilitasi dan Pengadaan PHA Sulawesi Barat	-	140,000,000	154,000,000	169,400,000	186,340,000
				Fasilitasi pengumpulan data DHA tingkat kabupaten	-	140,000,000	154,000,000	169,400,000	186,340,000
				Bimbingan teknis, Monitring dan Evaluasi DHA	-	40,000,000	44,000,000	48,400,000	53,240,000
				Pertemuan perumusan kebijakan teknis pembiayaan dan jaminan kesehatan masyarakat tingkat provinsi	-	50,000,000	55,000,000	60,500,000	66,550,000
				Fasilitasi penetapan kebijakan teknis pembiayaan dan jaminan kesehatan masyarakat tingkat provinsi	-	65,000,000	71,500,000	78,650,000	86,515,000
				Pengadaan dan distribusi kebijakan teknis pembiayaan dan jaminan kesehatan masyarakat tingkat provinsi	-	30,000,000	33,000,000	36,300,000	39,930,000
				Pertemuan perumusan perhitungan kebutuhan biaya pelayanan kesehatan prioritas yang dikembangkan	-	50,000,000	55,000,000	60,500,000	66,550,000
				Fasilitasi perhitungan kebutuhan biaya pelayanan kesehatan prioritas yang dikembangkan	-	65,000,000	71,500,000	78,650,000	86,515,000
				Pengadaan dan distribusi perhitungan kebutuhan biaya pelayanan kesehatan prioritas yang dikembangkan	-	30,000,000	33,000,000	36,300,000	39,930,000
				Fasilitasi ketersediaan data dan kebutuhan biaya pelayanan kesehatan prioritas	-	65,000,000	71,500,000	78,650,000	86,515,000
				Pengadaan dan distribusi data dan kebutuhan biaya pelayanan kesehatan prioritas	-	30,000,000	33,000,000	36,300,000	39,930,000
				Pelatihan DHA di 5 Kabupaten	-	350,000,000	385,000,000	423,500,000	465,850,000
				Pengumpulan data DHA tingkat kabupaten	-	150,000,000	165,000,000	181,500,000	199,650,000
				Bimbingan teknis, Monitring dan Evaluasi DHA	-	40,000,000	44,000,000	48,400,000	53,240,000
Mencegah,menurunkan dan mengendalikan penyakit menular dan tidak menular serta masalah kesehatan lainnya.				Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	2,255,834,000	2,368,625,700	2,487,056,985	2,611,409,834	
	Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Malaria	Annual Parasite Index Malaria menjadi 1 per 1.000 penduduk		Peningkatan Penemuan Kasus Program Pengendalian Penyakit Malaria	100,000,000	105,000,000	110,250,000	115,762,500	121,550,625
				Pengobatan Kasus Malaria menggunakan ACT	100,000,000	105,000,000	110,250,000	115,762,500	121,550,625
				Peningkatan Pencegahan Kejadian Malaria	50,000,000	52,500,000	55,125,000	57,881,250	60,775,313
				Pendistribusian dan evaluasi Kelambu Berinsektisida	150,000,000	157,500,000	165,375,000	173,643,750	182,325,938
				Penanganan dan Penanggulangan KLB Malaria	10,000,000	10,500,000	11,025,000	11,576,250	12,155,063
				Peningkatan Penemuan Kasus Program Pengendalian Penyakit DBD	100,000,000	105,000,000	110,250,000	115,762,500	121,550,625
				Peningkatan Penatalaksanaan Penderita dan Tersangka DBD	50,000,000	52,500,000	55,125,000	57,881,250	60,775,313
				Penanganan dan Penanggulangan KLB DBD	10,000,000	10,500,000	11,025,000	11,576,250	12,155,063
				Peningkatan Kewaspadaan Program Pengendalian Flu Burung	0	100,000,000	105,000,000	110,250,000	115,762,500
				Peningkatan Penatalaksanaan Kasus Zoonosa (Rabies, Antraks, Pes, Leptospirosis)	150,000,000	157,500,000	165,375,000	173,643,750	182,325,938
				Penanganan dan Penanggulangan KLB Kasus Zoonosa	10,000,000	10,500,000	11,025,000	11,576,250	12,155,063
				Peningkatan Pelaksanaan Program Eliminasi Filariasis	100,000,000	105,000,000	110,250,000	115,762,500	121,550,625

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Program	Kode	Program dan Kegiatan	2012	2013	2014	2015	2016
				Monitoring Pelaksanaan Pengobatan Massal Dalam Eliminasi Filariasis	50,000,000	52,500,000	55,125,000	57,881,250	60,775,313
				Survei Evaluasi Endemitas Filariasis Kabupaten/Kota Endemis Filariasis	0	1,000,000	1,050,000	1,102,500	1,157,625
				Peningkatan Manajemen Program Pengendalian Vektor	100,000,000	105,000,000	110,250,000	115,762,500	121,550,625
				Pemantauan Jentik Berkala	0	100,000,000	105,000,000	110,250,000	115,762,500
	Menurunnya Angka Kesakitan dan Kematian Akibat Penyakit Tuberkulosis	Persentase kasus baru TB Paru (BTA Positif) yang ditemukan		Peningkatan Penemuan Kasus Program Pengendalian Tuberkulosis	100,000,000	105,000,000	110,250,000	115,762,500	121,550,625
				Peningkatan Penyembuhan Kasus Program Pengendalian Tuberkulosis	100,000,000	105,000,000	110,250,000	115,762,500	121,550,625
				Pelaksanaan Pengobatan Kasus Program Pengendalian Tuberkulosis	100,000,000	105,000,000	110,250,000	115,762,500	121,550,625
				Peningkatan Manajemen Pelaksanaan Program Pengendalian HIV/AIDS	100,000,000	105,000,000	110,250,000	115,762,500	121,550,625
				Peningkatan Penatalaksanaan ODHA Mendapatkan ART	100,000,000	105,000,000	110,250,000	115,762,500	121,550,625
				Peningkatan Pengetahuan Komprehensif HIV/AIDS Penduduk > 15 tahun	100,000,000	105,000,000	110,250,000	115,762,500	121,550,625
				Peningkatan Konseling dan Testing HIV/AIDS bagi Penduduk > 15 tahun	100,000,000	105,000,000	110,250,000	115,762,500	121,550,625
				Peningkatan Penemuan Kasus Program Pengendalian ISPA	100,000,000	105,000,000	110,250,000	115,762,500	121,550,625
				Penemuan dan Tatalaksana Kasus Pneumonia Balita	50,000,000	52,500,000	55,125,000	57,881,250	60,775,313
				Peningkatan Penemuan Penderita Diare dan ISPL	100,000,000	105,000,000	110,250,000	115,762,500	121,550,625
				Peningkatan Cakupan Pelayanan Diare Pada Unit Layanan Kesehatan	50,000,000	52,500,000	55,125,000	57,881,250	60,775,313
				Penanganan dan Pengurangan KLB Diare	10,000,000	10,500,000	11,025,000	11,576,250	12,155,063
				Evaluasi Penggunaan Oralit dan Zink dalam Pengendalian Diare	50,000,000	52,500,000	55,125,000	57,881,250	60,775,313
				Peningkatan Penemuan Kasus Baru Kusta	100,000,000	105,000,000	110,250,000	115,762,500	121,550,625
				Evaluasi Kecatatan Tingkat II Kusta	100,000,000	105,000,000	110,250,000	115,762,500	121,550,625
				Peningkatan Penemuan Kasus Baru Frambusia	0	100,000,000	105,000,000	110,250,000	115,762,500
				Sosialisasi dan Advokasi Peraturan Daerah Tentang kawasan Tanpa Rokok	0	100,000,000	105,000,000	110,250,000	115,762,500
				Sosialisasi dan Advokasi Peraturan Daerah Tentang Dampak Merokok	0	100,000,000	105,000,000	110,250,000	115,762,500
				Sosialisasi dan Advokasi Pelaksanaan Program Penyakit Tidak Menular	50,000,000	52,500,000	55,125,000	57,881,250	60,775,313
	Angka penemuan Kasus Malaria per 1000 penduduk sebesar 1 pada tahun 2016	Angka penemuan Kasus Malaria per 1000 penduduk		Sosialisasi Program Penyakit Filariasis					
				Pelayanan TB dengan DOTS bagi Petugas Kabupaten					
				Intervensi Perubahan Perilaku dan Manajemen Program HIV/AIDS					
				Mini LEC Program Pengendalian Penyakit Menular					
				Sweeping Program Imunisasi	46,449,000		46,000,000	45,000,000	
	Desa yang mencapai UCI	Persentase desa UCI meningkat		Pemantauan Penyimpanan dan Penanganan Vaksin (HB-O, BCG, DPT/HB 1-3, Polio 1-4, Campak)	23,539,000				
				Peningkatan Pengetahuan Petugas tentang Surveilans Penyakit	140,086,000				
				Monitoring, evaluasi dan pelaporan	23,539,000				
				Supervisi Suportif program Imunisasi	23,631,000	25,000,000		150,000,000	
				Peningkatan Pengetahuan jurim tentang Save Injection		140,000,000			
				Sosialisasi Imunisasi TT 5 dosis		100,000,000			

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Program	Kode	Program dan Kegiatan	2012	2013	2014	2015	2016
				Peningkatan Pengetahuan tentang Surveilans Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I)		140,000,000			
				Fasilitasi dan Pemeliharaan Coolroom		5,000,000	5,000,000	7,000,000	7,000,000
				Bimbingan Teknis Program Surveilans		25,000,000			
				Dukungan operasional program imunisasi		10,000,000			
				Penyelidikan Epidemiologi & Penanggulangan KLB <24 jam		50,000,000	60,000,000	100,000,000	60,000,000
				Sosialisasi kesehatan Matra		95,000,000			
				Monev program Kesehatan Haji / Pelacakan calon Jemaah berisiko		25,000,000			
				Pengadaan Laptop		15,000,000			20,000,000
				Monitoring dan Evaluasi program Imunisasi			100,000,000		
				Dukungan operasional program imunisasi			10,000,000	12,000,000	12,000,000
				Peningkatan Pengetahuan petugas tentang tanggap KLB			140,000,000		
				Pertemuan Pengelola Program Kesehatan Haji			95,000,000	135,000,000	
				Bimtek program Kesehatan Haji			20,000,000		
				Peningkatan pengetahuan petugas tentang EVSM & DQS				150,000,000	
				Pertemuan Jejaring Surveilans Epidemiologi				90,000,000	
				Monev program sepimkesma				25,000,000	
				Pemantauan dan Evaluasi Imunisasi rutin					30,000,000
				Pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan KIPI					30,000,000
				Pertemuan terpadu pengelola surveilans					150,000,000
				Pertemuan evaluasi pelaksanaan kesehatan haji					140,000,000
				Legalisasi ICV Jemaah haji					70,000,000
				Pemantauan K3JH					50,000,000
	Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas mencapai 82% pada tahun 2016	Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas		Program Pengembangan Lingkungan Sehat	1,117,292,500	1,521,200,000	1,042,000,000	1,076,100,000	953,000,000
				Monitoring, evaluasi & pelaporan	55,705,000	60,000,000	110,000,000	110,000,000	110,000,000
				Sosialisasi dan advokasi dampak perubahan iklim	88,123,500				

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Program	Kode	Program dan Kegiatan					
					2012	2013	2014	2015	2016
				Pelatihan survailans Kualitas air dan penyehatan lingk.	88,123,500				
				Pelatihan STBM	88,073,500				
				Penilaian Pembinaan Dlm rangka Lomba desa	14,190,000				
				Pengadaan Penyaringan/Penyulingan air	100,000,000				
				Orientasi promosi higiene sanitasi	24,000,000				
				Pelatihan petugas studi EHRA	72,585,000				
				Pertemuan koordinasi dalam rangka evaluasi perencanaan kegiatan	59,877,000		60,000,000	12,000,000	60,000,000
				Laporan kegiatan	7,600,000				
				Dalam Rangka Mengikuti Penyusunan rencana Kerja dan Anggaran yang dilaksanakan CPIU Pamsimas Pusat	12,920,000				
				Dalam Rangka Mengikuti Konsolidasi dan Koordinasi Program Pamsimas dilaksanakan CPIU Pamsimas Pusat	24,800,000				
				Dalam Rangka Mengikuti Pertemuan Progres Manajemen Report Program Pamsimas dilaksanakan CPIU Pamsimas Pusat	9,920,000				
				Surveillance Kualitas Air Bersih Provinsi / Kabupaten / Puskesmas	16,630,000				
				Village CLTS Activitas Provinsi Kabupaten/Kota/Puskesmas	40,075,000				
				Implementing Village Facilitation Proses pemicuan di Desa. Provinsi, Kabupaten/Kota/Puskesmas	91,100,000				
				Monitoring Village For Sanitarian (Monitoring di Desa Program Pamsimas bg petugas sanitasi Provinsi, Kabupaten/Kota/Puskesmas	22,145,000				
				Awareness For School communities Provinsi, Kabupaten/Kota/Puskesmas	15,930,000				
				Monitoring and Evaluation of Villlage Implementation Provinsi, Kabupaten/Kota/Puskesmas	91,100,000				
				Promotion Hygiene and Sanitation Provinsi, Kabupaten/Kota/Puskesmas	15,430,000				
				Monitoring for Hygiene Behaviour Change and sanitation access Provinsi, Kabupaten/Kota/Puskesmas	114,100,000			114,100,000	
				Pertemuan Nasional Program Pamsimas Komponen B yg dilaksanakan CPIU Pamsimas Komponen B	27,300,000				
				Advocacy and workshop at district level forMarketing approach	25,265,000				
				Dalam rangka mengikuti Advokasi Worskhop For marketing approach yang dilaksanakan CPIU Pamsimas Komponen B	12,300,000				
				Dokumen evaluasi dan Pelaporan					
				Pelatihan Klinik Sanitasi bagi tenaga Sanitarian se Provinsi Sulawesi Barat		250,000,000			
				Pengadaan kendaraan operasional Program Penyehatan Lingkungan dan Sanitasi (roda 4 double handle 4x4)		300,000,000			

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Program	Kode	Program dan Kegiatan	2012	2013	2014	2015	2016
				Pengawasan pembinaan tempat-tempat umum (TTU)		60,000,000	96,000,000	96,000,000	96,000,000
				Sosialisasi dan Advokasi Penanganan Limbah Medis, Udara dan Radiasi		115,200,000			
				Pengadaan alat pengolah Data (2 Unit)		30,000,000	30,000,000	30,000,000	
				Pengadaan Water Test Kit (6 Paket)		588,000,000			
				Pendampingan Pemicuan STBM di desa PAMSIMAS		30,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
				Orientasi Promosi Hygiene dan Sanitasi (PHBS) di Masyarakat dan Sekolah		24,000,000			110,000,000
				Lanjutan EHRA (PPSP)		30,000,000	30,000,000	60,000,000	30,000,000
				Pelaporan kegiatan		9,000,000	21,000,000	9,000,000	12,000,000
				Pendampingan Tim Auditor BPKP ke desa		25,000,000			
				Replikasi desa pamsimas (1 desa)			525,000,000	525,000,000	525,000,000
				Pengadaan kendaraan bermotor (roda dua)			50,000,000		
				Orientasi Promosi Hygiene & Sanitasi (PHBS) di Sekolah dan Masyarakat			110,000,000	110,000,000	
Meningkatnya sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar dan terjangkau oleh masyarakat.	Persentase ketersediaan obat dan vaksin sebesar 100%	Persentase Ketersediaan Obat dan vaksin		Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	1,333,115,500	2,688,000,000	2,643,500,000	2,969,000,000	3,497,000,000
				Monitoring Farmasi Komunitas dan Klinik di rumah Sakit	18,230,000	19,000,000	10,500,000	11,000,000	12,000,000
				Pertemuan Penggunaan Obat Anti biotika yang Rasional	97,235,000	165,000,000	165,000,000	170,000,000	170,000,000
				Pertemuan peningkatan Pengguna Obat Rasional melalui swamedikasi bagi kader kesehatan	112,710,000	153,000,000	153,000,000	170,500,000	170,500,000
				Monitoring Kesertersediaan Obat indikator UKP4 di Kabupaten	52,440,000	75,000,000	75,500,000	75,500,000	75,000,000
				Pertemuan Perizinan Obat Tradisional dan Alkes	69,995,500				
				Pertemuan Evaluasi Program Pelayanan Kefarmasian dan alkes	92,716,000				
				Pemantauan dan Penulisan Penggunaan Obat Generik dan Obat di Puskesmas		52,000,000	75,000,000	75,000,000	75,000,000
				Pemantauan dan Penulisan Penggunaan Obat Generik dan Obat di Rumah sakit		52,000,000	75,000,000	75,000,000	75,000,000
				Pertemuan Informasi Bahan Tambahan Makanan	70,020,000	115,000,000	-	-	200,000,000
				Inventarisasi tanaman obat tradisional		150,000,000	-	-	-
				Monev Pemanfaatan Alkes disarana pelayanan kesehatan		40,000,000	40,500,000	41,000,000	41,500,000
				Monev Obat Tradisional di sarana distribusi dan pengobat tradisional		20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000
				Monev Pembinaan sarana distribusi PAK (Penyalur Alat Kesehatan)	13,210,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000
				Pembinaan sarana produksi PKRT (Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga)		20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000
				Sampling Alkes dan PKRT	78,970,000	90,000,000	95,000,000	100,000,000	110,000,000

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Program	Kode	Program dan Kegiatan	2012	2013	2014	2015	2016
				Pembinaan Sarana Distribusi Alkes dan PKRT	58,350,000				
				Sosialisasi Peraturan di Bidang Produksi Obat, Obat Tradisional Kosmetik/Makanan	74,130,000				
				Pelatihan Sampling Alkes dan PKRT bagi Petugas Provinsi dan Kabupaten		120,000,000			
				Penyediaan Obat Buffer Stock di Instalasi Farmasi	445,000,000	700,000,000	800,000,000	900,000,000	1,000,000,000
				Penyediaan Dana Distribusi Obat Buffer Stock dan Perbekalan Kesehatan di IFP	-	100,000,000	125,000,000	150,000,000	175,000,000
				Penyediaan Data Stok Opname Obat Buffer Stock di IFP	49,221,000	55,000,000	65,000,000	75,000,000	85,000,000
				Monev Penggunaan Obat Tepat Sasaran di IFK dan PKM	-	200,000,000	250,000,000	300,000,000	350,000,000
				Pelatihan Manajemen Kefarmasian di Instalasi Farmasi	95,578,000	100,000,000	120,000,000	140,000,000	180,000,000
				Rehabilitasi Perbaikan Gedung Kantor IFP	-	125,000,000	150,000,000	175,000,000	200,000,000
				Monitoting dan Pengawasan Obat Narkotik dan Psikotropik di IFK 5 kab	-	30,000,000	40,000,000	50,000,000	60,000,000
				Perencanaan Obat Terpadu (POT) Instalasi Farmasi Provinsi	-	80,000,000	85,000,000	90,000,000	95,000,000
				Penyediaan Bahan Oprasional di IFP	5,310,000	7,000,000	9,000,000	11,000,000	13,000,000
				Monev ketercukupan Obat instalasi Farmasi Kabupaten di IFK dan Puskesmas		200,000,000	250,000,000	300,000,000	350,000,000
				Program Pengawasan Obat dan Makanan	52,000,000	160,000,000	200,000,000	215,000,000	230,000,000
				Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	52,000,000	75,000,000	100,000,000	115,000,000	130,000,000
				Pengawasan, Pembinaan dan Pengujian Jajanan Anak Sekolah (FGD)		85,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
Meningkatnya kualitas manajemen dan perencanaan bidang kesehatan	100% dokumen perencanaan dan anggaran tersusun sesuai standar	Meningkatnya manajemen kesehatan		Program Kebijakan dan Management Pembangunan Kesehatan	1,017,033,000	1,067,884,650	1,121,278,883	1,177,342,827	1,236,209,968
				Penyusunan Perencanaan Kinerja dan Keuangan	163,148,500	171,305,925	179,871,221	188,864,782	198,308,021
				Rapat Evaluasi Program MDG'S Bidang Kesehatan	59,355,000	62,322,750	65,438,888	68,710,832	72,146,373
				Penyusunan Buku Laporan Tahunan MDG'S	13,200,000	13,860,000	14,553,000	15,280,650	16,044,683
				Rapat Koordinasi Tindak lanjut Atas Laporan Hasil Pemeriksaan	60,792,500	63,832,125	67,023,731	70,374,918	73,893,664
				Monitoring dan Evaluasi Laporan Keuangan Atas Aset Negara	25,470,000	26,743,500	28,080,675	29,484,709	30,958,944
				Fasilitasi Penanggulangan Daerah Bermasalah Kesehatan	38,355,000	40,272,750	42,286,388		
				Koordinasi lintas Program dan lintas sektor Pemerintah Sulawesi Barat	60,107,000	63,112,350	66,267,968	69,581,366	73,060,434
				Peningkatan Kapasitas SDM Perencana Provinsi dan Kabupaten	83,915,000	88,110,750	92,516,288	97,142,102	101,999,207
				Peningkatan kapaistas SDM Perencana Tk Puskesmas		147,415,000		154,000,000	
				Pertemuan penyusunan percanaan tingkat Provinsi	66,560,000	69,888,000	73,382,400	77,051,520	80,904,096
				Rapat koordinasi se- Provinsi Sulawesi Barat	107,480,000	112,854,000	118,496,700	124,421,535	130,642,612

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Program	Kode	Program dan Kegiatan					
					2012	2013	2014	2015	2016
				Rapat Koordinasi kesehatan Pusat dan daerah (Binwil)		119,000,000			12,100,000
				Rapat Kerja Kesehatan Nasional	100,050,000	102,640,000	107,772,000	113,160,600	118,818,630
				Rapat konsultasi DAK		161,760,000	169,848,000	178,340,400	187,257,420
				Bimbingan teknis perencanaan ke Kab		48,180,000	50,589,000	53,118,450	55,774,373
				Pertemuan Evaluasi Pelaporan Tingkat Provinsi	66,560,000	69,888,000	73,382,400	77,051,520	80,904,096
				Monev ke Kabupaten	29,240,000	30,702,000	32,237,100	33,848,955	35,541,403
				Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	7,750,000	8,137,500	8,544,375	8,971,594	9,420,173
				Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	16,700,000	17,535,000	18,411,750	19,332,338	20,298,954
				Penyusunan Renstra SKPD	19,750,000				
				Penyusunan RKA-SKPD	19,750,000	20,737,500	21,774,375	22,863,094	24,006,248
				Penyusunan DPA-SKPD	15,000,000	15,750,000	16,537,500	17,364,375	18,232,594
				Penyusunan laporan keterangan pertanggung jawaban SKPD	7,500,000	7,875,000	8,268,750	8,682,188	9,116,297
				Penyusunan Petunjuk Teknis Satker	8,550,000	8,977,500	9,426,375	9,897,694	10,392,578
				Penyusunan RKAKL	34,000,000	35,700,000	37,485,000	39,359,250	41,327,213
				Penyusunan evaluasi kinerja PP39	13,800,000	13,800,000	14,490,000	15,214,500	15,975,225
				Workshop peningkatan SDM Pengelolaan Keuangan		120,000,000		126,000,000	
				Penyusunan Profil Anggaran		7,500,000	7,875,000	8,268,750	8,682,188
		100% Provinsi dan kabupaten dengan daerah bermasalah Kesehatan (DBK) mendapat fasilitasi Penanggulangan DBK		Kalakarya Kesehatan	-	500,000,000	550,000,000	600,000,000	300,000,000
				Evaluasi Publik Pelayanan Kesehatan		200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000
				Workshop Analisis Riskesdas	-	-	200,000,000	-	-
				Fasilitasi pengembangan desa Sehat bangun mandar		320,000,000	1,500,000,000	1,200,000,000	1,300,000,000
Meningkatnya kualitas Sumber daya kesehatan	100 % tenaga kesehatan yang lulus uji kompetensi berizin	Teregistrasinya tenaga kesehatan		Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1,351,374,000	1,418,942,700	1,489,889,835	1,564,384,327	1,642,603,543
				Pembekalan tenaga kesehatan	153,054,000	160,706,700	168,742,035	177,179,137	186,038,094
				Penilaian bagi tenaga kesehatan teladan	146,980,000	154,329,000	162,045,450	170,147,723	178,655,109
				Pelatihan Petugas Pemeriksa kesehatan jamaah Haji	120,180,000	126,189,000	132,498,450	139,123,373	146,079,541
				Bantuan Operasional Bea Siswa	306,050,000	321,352,500	337,420,125	354,291,131	372,005,688
				Pengumpulan Data SDM	103,660,000	108,843,000	114,285,150	119,999,408	125,999,378

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Program	Kode	Program dan Kegiatan	2012	2013	2014	2015	2016
				Penyajian Data SDM Tingkat Provinsi	46,180,000	48,489,000	50,913,450	53,459,123	56,132,079
				Finalisasi Data SDM Kesehatan	54,310,000	57,025,500	59,876,775	62,870,614	66,014,144
				Pertemuan Perencanaan Kebutuhan SDM Kab/Kota	87,080,000	91,434,000	96,005,700	100,805,985	105,846,284
				Operasional MTKP	261,880,000	274,974,000	288,722,700	303,158,835	318,316,777
				Pengelolaan Nakes PTT	72,000,000	75,600,000	79,380,000	83,349,000	87,516,450
Tersusunnya data dan Informasi Kesehatan yang akurat, akuntabel, lengkap dan tepat waktu	100% Kabupaten dan provinsi menyusun Profil Kesehatan dan memiliki Sistem Informasi Kesehatan	100 % Kab memiliki profil kesehatan menurut Jenis Kelamin		Program Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan	408,400,000	1,029,955,500	1,377,740,150	1,639,877,158	1,123,116,015
				Pengembangan Sistem Informasi kesehatan (SIK)	21,600,000	45,000,000	250,000,000	150,000,000	165,000,000
				Pelatihan Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) Generik		120,000,000	132,000,000	145,200,000	167,000,000
				Monitoring dan evaluasi Standar pelayanan minimal bidang kesehatan	33,560,000	35,238,000	36,999,900	38,849,895	40,792,390
				Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan	13,200,000	13,860,000	14,553,000	15,280,650	16,044,683
				Pengumpulan data kesehatan Kabupaten	107,720,000	113,106,000	118,761,300	124,699,365	130,934,333
				Penyusunan Profil Kesehatan Kabupaten	88,220,000	92,631,000	97,262,550	102,125,678	107,231,961
				Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi	25,480,000	26,754,000	28,091,700	29,496,285	30,971,099
				Pertemuan Penyajian Data Tingkat Provinsi	96,190,000	100,999,500	106,049,475	111,351,949	116,919,546
				Operasional SIKDA	22,430,000	23,551,500	24,729,075	25,965,529	27,263,805
				Peningkatan kompetensi SDM bidang TI		98,000,000		102,900,000	
				Cross Check Data Kesehatan		50,460,000	52,983,000	55,632,150	58,413,758
				Penyusunan Peta Informasi Rawan Gizi		125,000,000			
				Workshop analisis riskesdas				120,000,000	
				Workshop Analisis Riset faskes		131,012,500			
				Pelatihan penyusun Profil Kesehatan			200,000,000	230,000,000	
				Pengembangan Sistem Informasi Puskesmas			250,000,000	300,000,000	150,000,000
				Percetakan Buku Informasi Kesehatan		15,000,000.00	25,000,000	45,000,000	67,000,000
				Diseminasi Data Kesehatan		39343000	41,310,150	43,375,658	45,544,440